

BAB III

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

Kegiatan magang berlangsung di PT Ofisi Prima Konsultindo, tepatnya berada di AKR Tower Jl. Panjang No.5 11, RT.11/RW.10, Kb. Jeruk, Kota Jakarta Barat. Dalam kegiatan magang yang saya lakukan, saya ditempatkan di divisi *tax compliance* yang berfokus pada jasa perpajakan dan sistem akuntansi. Proses pelaksanaan magang di PT Ofisi Prima Konsultindo berlangsung dari 6 Januari 2025 hingga 6 Mei 2025. Selama magang berlangsung, saya berada di bawah bimbingan Ibu Reni Musdalipa selaku *tax specialist* di PT. Ofisi Prima Konsultindo dan karyawan lainnya.

3.2 Tugas dan Uraian Kerja Magang

Selama melaksanakan kegiatan magang di PT Ofisi Prima Konsultindo, penulis terlibat dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan divisi *tax compliance* dan *accounting*. Adapun uraian tugas yang telah dilaksanakan selama periode magang adalah sebagai berikut:

1. PT. T

A. Menghitung Pajak Penghasilan (PPh) 21

Menghitung PPh 21 merupakan proses perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan untuk periode tertentu berdasarkan gaji, tunjangan, dan bentuk penghasilan lainnya yang diberi pemberi kerja dan diterima oleh karyawan. Tujuan menghitung PPh 21 adalah memastikan perhitungan pajak yang dilakukan sudah benar sebelum dipindahkan ke dalam Coretax untuk menghasilkan bukti potong. Dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas ini adalah rekapan gaji, iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, format rekap serta format perhitungan PPh 21 yang didapat dari mentor. Perhitungan PPh 21 dilakukan untuk 2 orang karyawan PT T Berikut tahapan dalam mengerjakan perhitungan PPh 21 bagi karyawan tetap di bulan Februari 2025:

a. Menerima rekap gaji bulan Februari

PT.T							
TO PAY SALARY February 2025							
No.	NAME	Position	BCA Branch	Account No.	Salary	Add director	car allowance
1	Nusa	Operasional	JAKARTA	15000000000001	5.428.853	1.500.000	
2	Rara	sales Manager			30.000.000		2.000.000

Gambar 3. 1 Rekap Gaji

Berdasarkan Gambar 3.1, diketahui karyawan dengan nama Nusa menjabat posisi operasional di kantor cabang Jakarta memiliki nomor *account* 15000000000001, dengan gaji sebesar Rp5.428.853, dan tunjangan jabatan sebesar Rp1.500.000. Selain itu, terdapat karyawan dengan nama Rara yang menjabat sebagai *sales manager* dengan gaji sebesar Rp30.000.000 serta menerima tunjangan transport sebesar Rp2.000.000.

b. Menerima rekap BPJS Ketenagakerjaan bulan Februari

RINCIAN IURAN TENAGA KERJA FEBRUARI 2025						
No	Nomor KPJ	Nama Tenaga Kerja	Tgl lahir (tgl/bln/tz)	Data Upah Rp	Iuran JKK Rp	Iuran JKM Rp
1	10.000.000.001	Nusa		5.428.853	13.029	16.283
2		Rara		30.000.000		

Gambar 3. 2 Rekap BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Gambar 3.2, diketahui tenaga kerja dengan nama Nusa memiliki nomor Kartu Pekerja Jamsostek (KPJ) 10.000.000.001, dengan data upah (gaji) sebesar Rp5.428.853, iuran JKK sebesar Rp13.029, dan iuran JKM sebesar Rp16.283. Dikarenakan Nusa bekerja di bagian operasional, PT T memberikan iuran BPJS Ketenagakerjaan tiap bulannya sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja yang mungkin dihadapi selama menjalankan tugas.

c. Menerima rekap BPJS Kesehatan bulan Februari

No.	Nama	NIK	Gaji Pokok	Tunjangan Tetap	Total Gaji	Gaji untuk Perhitungan Iuran	Iuran 4%
6	Nusa	0XXXXXXXXXXXXXXX	5.428.853	1.500.000	6.928.853	6.928.853	277.154

Gambar 3. 3 Dokumen BPJS Kesehatan

Berdasarkan Gambar 3.3, diketahui karyawan dengan nama Nusa memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 0XXXXXXXXXXXXXXX memperoleh gaji sebesar Rp5.428.853 dengan tunjangan tetap sebesar Rp1.500.000, sehingga total gaji yang diterima sebesar Rp6.928.853. Gaji tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan iuran BPJS Kesehatan, dengan jumlah iuran BPJS Kesehatan setelah dikali 4% sebesar Rp277.154.

d. Menerima format rekap dalam bentuk *Ms. Excel*

Pegawai Tetap												
No	Nama (Sesuai NPWP)	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25
		Penghasilan Teratur										
		Gapok	Tunjangan Pegawai			Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja				Total Rp.	Penghasilan Bruto	
			Tunj. Jabatan	Tunj. Transport	Total	JKK (0,24%)	JKM (0,30%)	BPJS Kes (4%)	Total Premi			
1	Nusa	56	59	60	70	71	72	73	74	78	84	
2	Rara											
300												
SUM		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gambar 3. 4 File Rekap

Berdasarkan Gambar 3.4, format rekap berisi nama yang telah terisi, gapok (gaji), tunjangan jabatan, tunjangan transport, total tunjangan pegawai, JKK, JKM, BPJS Kesehatan, total premi, total keseluruhan, dan penghasilan bruto.

e. Melakukan perhitungan bruto

Pegawai Tetap												
No	Nama (Sesuai NPWP)	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25	Feb-25
		Penghasilan Teratur										
		Gapok	Tunjangan Pegawai			Premi Asuransi Dibayar Pemberi Kerja				Total Rp.	Penghasilan Bruto	
			Tunj. Jabatan	Tunj. Transport	Total	JKK (0,24%)	JKM (0,30%)	BPJS Kes (4%)	Total Premi			
1	Nusa	56	59	60	70	71	72	73	74	78	84	
1	Nusa	5.428.853	1.500.000	0	1.500.000	13.029	16.283	277.154	306.466	7.235.319	7.235.319	
2	Rara	30.000.000	0	2.000.000	2.000.000				0			32.000.000
300					0				0	0	0	0
SUM		35.428.853	1.500.000	2.000.000	3.500.000	13.029	16.283	277.154	306.466	7.235.319	39.235.319	
SUBTOTAL		35.428.853	1.500.000	2.000.000	3.500.000	13.029	16.283	277.154	306.466	7.235.319	39.235.319	

Gambar 3. 5 Perhitungan Bruto Bulan Februari

Berdasarkan Gambar 3.5, untuk menghasilkan perhitungan bruto perlu dilengkapi dengan dokumen rekap gaji, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Kesehatan pada Gambar 3.1, 3.2, serta 3.3 sebagai berikut:

1. Mengisi gaji pokok sebesar Rp5.428.853, dengan tambahan tunjangan jabatan sebesar Rp1.500.000.
2. Mengisi iuran JKK sebesar Rp13.029 dan JKM Rp16.283.
3. Mengisi BPJS Kesehatan sebesar Rp277.154, sehingga total penghasilan bruto mencapai Rp7.235.319.

f. Menerima format perhitungan PPh 21 bulan Februari

No.	NPWP 15 Digit	NPWP 16 Digit (NIK)	Nama Pegawai	PTKP	Penghasilan Bruto				PENGHITUNGAN PPh 21 IRREGULER			
					Gaji	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	Jumlah Penghasilan Bruto	TER A/B/C	Persentase TER A/B/C	PPh 21 Sebulan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0000000000000000	0000000000000000	Nusa	K2					TER B	0,00%	-	-
2	0000000000000000	0000000000000000	Rara	K2					TER B	0,00%	-	-
3	00 000 000 0-000 000	0000000000000000		0/0					0	0,00%	-	-
Jumlah				0/0					0	0,00%	-	-

Gambar 3. 6 Format Perhitungan PPh 21

Berdasarkan Gambar 3.6 diketahui format perhitungan PPh 21 yang telah terisi adalah NPWP 15 digit, NPWP 16 digit (yang dibuat oleh kantor tempat magang dengan tujuan proses *penginputan* ke dalam Coretax), nama pegawai, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan TER A/B/C sejak diterimanya format perhitungan. Adapun bagian yang perlu diisi untuk melengkapi Gambar 3.6 diantaranya, gaji, tunjangan lainnya, premi asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan jumlah penghasilan bruto. Sementara itu, untuk persentase TER A/B/C akan terisi secara otomatis setelah bagian dari kolom penghasilan bruto diisi.

g. Menerima dokumen tambahan persentase TER B

Pegawai Tetap		
Dari	s/d	TER B
0	6.200.000	0,00%
6.200.001	6.500.000	0,25%
6.500.001	6.850.000	0,50%
6.850.001	7.300.000	0,75%
7.300.001	9.200.000	1,00%
27.700.001	29.350.000	11,00%
29.350.001	31.450.000	12,00%
31.450.001	33.950.000	13,00%
33.950.001	37.100.000	14,00%

Gambar 3. 7 Kategori Persentase TER B

Berdasarkan Gambar 3.7, kategori persentase TER B untuk pegawai Nusa dengan penghasilan bruto Rp6.850.001 sampai Rp7.300.000 mempunyai persentase sebesar 0,75%, sedangkan pegawai Rara dengan penghasilan bruto Rp31.450.001 sampai Rp33.950.000 mempunyai persentase sebesar 13%.

h. Melakukan perhitungan PPh 21

Berikut perhitungan PPh 21 untuk bulan Februari:

No.	NPWP 15 Digit	NPWP 16 Digit (NIK)	Nama Pegawai		PTKP
1	2	3	4	5	8
1	0XXXXXXXXXXXXX	0XXXXXXXXXXXXX	Nusa		K/2
2	1XXXXXXXXXXXXX	1XXXXXXXXXXXXX	Rara		K/2
3	00.000.000.0-000.000	000000000000000000	0		0/0
300	00.000.000.0-000.000	000000000000000000	0		0/0
Jumlah		-			

Penghasilan Bruto				PENGHITUNGAN PPh 21 IRREGULER		PPh 21 Sebulan
Gaji	Tunjangan Lainnya, Uang Lembur, dsb.	Premi Asuransi yang Dibayar Pemberi Kerja	Jumlah Penghasilan Bruto	TER A/B/C	Persentase TER A/B/C	
15	17	19	22	29	30	34
5.428.853	1.500.000	306.466	7.235.319	TER B	0,75%	54.265
30.000.000	2.000.000	-	32.000.000	TER B	13,00%	4.160.000
			-	0	0,00%	-
			-	0	0,00%	-
35.428.853	3.500.000	306.466	39.235.319	-	-	4.214.265

Gambar 3. 8 Perhitungan PPh 21 bulan Februari

Berdasarkan Gambar 3.8, perhitungan PPh 21 diisi sesuai dengan dokumen format perhitungan bruto pada Gambar 3.5 sebagai berikut:

1. Mengisi gaji sebesar Rp5.428.853.
2. Mengisi tunjangan lainnya sebesar Rp1.500.000
3. Mengisi premi asuransi yang dibayar pemberi kerja sebesar Rp306.466.
4. Mengisi jumlah penghasilan bruto sebesar Rp7.235.319

Di bulan Februari 2025, status PTKP untuk kedua pegawai tetap yaitu K/2 yang artinya, Nusa dan Rara sudah kawin dan mempunyai 2 tanggungan, sehingga persentase TER B untuk nusa sebesar 0,75% dan Rara sebesar 13%. Maka dari itu, dapat diperoleh PPh 21 sebulan dari hasil perkalian jumlah penghasilan bruto dengan persentase TER B untuk Nusa sebesar Rp54.265 ($Rp7.235.319 \times 0,75\%$) dan Rara sebesar Rp4.160.000 ($Rp32.000.000 \times 13\%$).

i. Setelah pekerjaan selesai, dokumen perhitungan PPh 21 diberikan kepada mentor untuk di-review terlebih dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.

2. PT Hoya

A. Membuat Buku Besar Rinci untuk Akun Pembelian

Membuat buku besar rinci untuk akun pembelian merupakan proses merekap pembelian perusahaan ke dalam *software* Accurate berdasarkan jumlah kuantitas dan harga barang yang dibeli dalam satu transaksi. Tujuan membuat buku besar rinci akun pembelian adalah untuk mencatat seluruh pembelian perusahaan perbulan, yang akan tersaji dalam buku besar rinci dan berpengaruh terhadap akun persediaan dalam laporan neraca. Selain itu, membuat buku besar rinci akun pembelian juga digunakan untuk pelaporan persediaan di lampiran 8A-6 SPT Badan. Dokumen yang diperlukan untuk menyusun proses ini adalah *database* laporan keuangan perusahaan klien dan *softcopy* nota pembelian yang didapat dari mentor. Penyusunan buku besar rinci akun pembelian dilakukan dari bulan Oktober-Desember 2024. Berikut tahapan dalam membuat buku besar rinci akun pembelian dengan contoh di bulan November 2024:

a) Menerima *soft copy* bon pembelian

NOTA			
No. _____	Tanggal 21-11-24		
B. _____	Telp. : _____		
Nama Barang	Jumlah	Harga	Total
Besi Tua	1750	2950	5.251.000
Diterima,		Diketahui,	

Gambar 3. 9 Softcopy Bon Pembelian

Berdasarkan Gambar 3.9, pada tanggal 1 November 2024, PT Hoya melakukan pembelian besi tua sebanyak 1.780 unit dengan harga satuan sebesar Rp2.950, sehingga total pembelian mencapai Rp5.251.000 (Rp2.950 x 1.780).

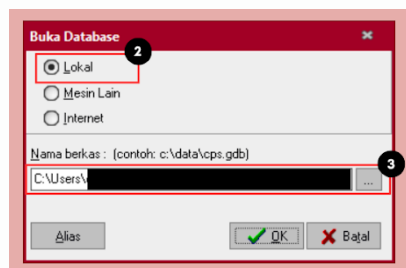
b) Berikut proses pengisian nota pembelian ke dalam aplikasi *Accurate*:

1. Masuk ke dalam aplikasi *Accurate*, lalu pilih gambar *file manager* [1].



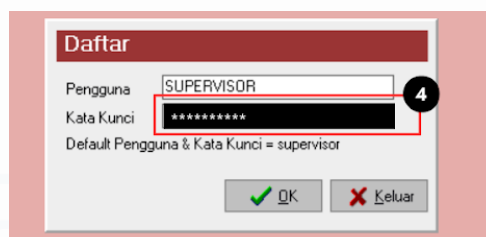
Gambar 3. 10 Halaman Awal Accurate

2. Pilih kategori “Lokal” [2] pada halaman *database*, lalu masukkan dokumen *database* [3] yang diberi dari mentor.



Gambar 3. 11 Halaman Awal Database

3. Masukkan “Kata Kunci” [4] pada halaman daftar sesuai dengan nama pengguna.



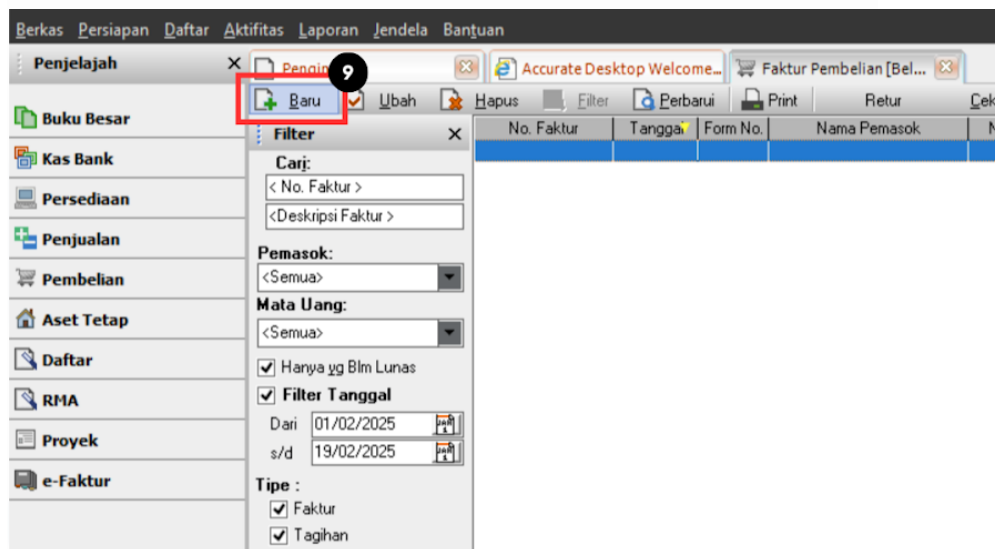
Gambar 3. 12 Halaman Daftar

4. Setelah masuk ke halaman utama *Accurate*, klik “Daftar” [5] lalu pilih “Pembelian” [6] dengan kategori “Faktur Pembelian” [7].



Gambar 3. 13 Halaman Utama Accurate

5. Halaman selanjutnya akan menampilkan laman kosong bagian menu faktur pembelian. Klik “Baru” [9] untuk membuat faktur pembelian.



Gambar 3. 14 Laman Utama Menu Faktur Pembelian

6. Setelah klik “Baru”, akan muncul tampilan seperti berikut:

Purchase Inv

Vendor: 1000 Pemasok Umum

Form No.: JP/PTH/24/11/001 Invoice No.: JP/PTH/24/11/001 Invoice Date: 01/11/2024 Ship Date: 01/11/2024

FOB: Terms: C.O.D. Ship Via: Amount: 0

Item	Description	Qty	Unit Price	Amount	Projek	SN
012	Besi Tua	1.780	Rp 2.950	Rp 5.251.000		

Sub Total: 5.251.000 Discount: 0 % = 0

Total: 5.251.000

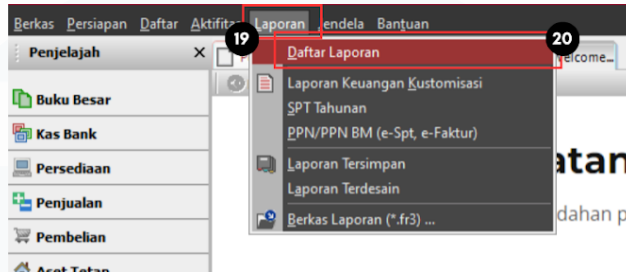
Buttons: Simpan & Baru, Simpan & Tutup, Batal

Gambar 3. 15 Halaman Faktur Pembelian

Berdasarkan Gambar 3.15, halaman faktur pembelian diisi berdasarkan *softcopy* pembelian pada Gambar 3.9, sebagai berikut:

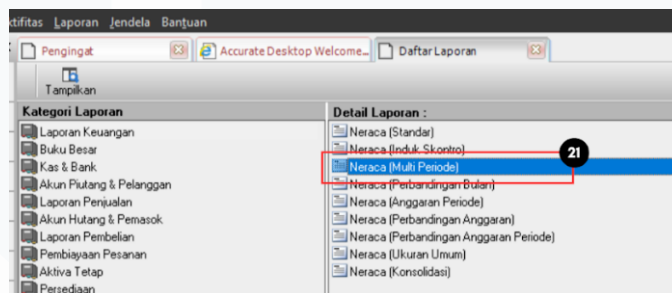
- Mengisi kolom “Vendor” [10] dengan “Pemasok Umum” karena transaksi pembelian jenis besi tua berasal dari satu pihak yang sama.
- Mengisi kolom “Form No” [11] dan “Invoice No” [12] dengan kode yang sama, yaitu “JP/PTH/24/11/001” yang diberikan oleh mentor sebagai pembeda dengan bon lainnya, dikarenakan transaksi pembelian pada bon ini tidak terdapat nomor dokumen.
- Mengisi “Invoice Date” [13] dan “Ship Date” [14] sesuai dengan dengan *softcopy* bon pembelian pada Gambar 3.9 yaitu 1 November 2024.
- Mengisi kolom “Item” [15] dengan kode 012 atau pilih nama barang “besi tua” yang sudah terhubung secara otomatis dengan kolom *description*.
- Masukkan jumlah “Quantity” [16] sebanyak 1.780 unit dan “Unit Price” [17] sebesar Rp2.950, sehingga jumlah pembelian senilai Rp5.251.000 ($Rp2.950 \times 1.780$).
- Setelah itu, klik “Simpan & Baru” [18] untuk melanjutkan proses pembuatan faktur pembelian.

7. Untuk melihat transaksi pembelian yang telah dibuat masuk ke dalam buku besar rinci, klik “Laporan” [19], lalu “Daftar Laporan” [20].



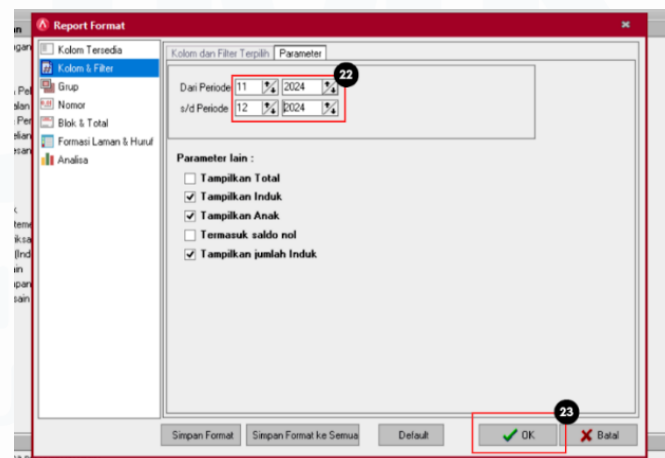
Gambar 3. 16 Halaman Utama Accurate

8. Klik “Neraca (Multi Periode)” [21] pada detail laporan.



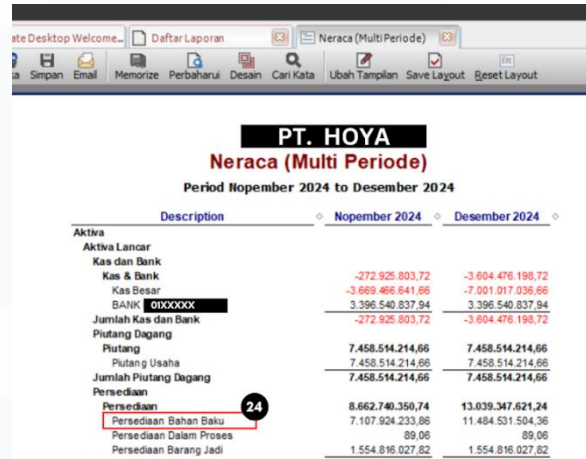
Gambar 3. 17 Halaman Utama Submenu Daftar Laporan

9. Pada *report format*, pilih sub menu kolom dan filter untuk memfilter tanggal transaksi pembelian yang sudah ter-*input*, yaitu “Dari Periode 11-2024 sampai Periode 12-2024” [12]. Selanjutnya, klik “Ok” [23] untuk membuka laporan Neraca (Multi Periode).



Gambar 3. 18 Laman Filter Format Laporan Neraca

10. Pada laman utama laporan Neraca (Multi Periode), pilih “Persediaan Bahan Baku” [24] untuk melihat transaksi pembelian yang sudah ter-*input*.



Description	November 2024	Desember 2024
Aktiva		
Aktiva Lancar		
Kas dan Bank		
Kas & Bank	-272.925.803,72	-3.604.476.198,72
Kas Besar	-3.669.466.641,66	-7.001.017.036,66
BANK 000000	3.396.540.837,94	3.396.540.837,94
Jumlah Kas dan Bank	-272.925.803,72	-3.604.476.198,72
Piutang Dagang		
Piutang	7.458.514.214,66	7.458.514.214,66
Piutang Usaha	7.458.514.214,66	7.458.514.214,66
Jumlah Piutang Dagang	7.458.514.214,66	7.458.514.214,66
Persediaan		
Persediaan	8.662.740.350,74	13.039.347.621,24
Persediaan Bahan Baku	7.107.924.233,86	11.484.531.504,36
Persediaan Dalam Proses	89,06	89,06
Persediaan Barang Jadi	1.554.816.027,82	1.554.816.027,82

Gambar 3. 19 Laman Utama Laporan Neraca

11. Berikut tampilan transaksi pembelian yang telah terinput:



Tanggal	Sumber	No. Sumber	Keterangan	Debit	Kredit	Filter berdasarkan No. Akun Balance
1200.01	Persediaan Bahan Baku			3.617.006.004,28	Dr	
01 Nov 2024	Faktur Pembelian	JP/PTH/24/11/001	(Pemasok Umum) Faktur pembelian	5.251.000,00	0,00	X) 3.622.277.004,28
01 Nov 2024	Faktur Pembelian		(Pemasok Umum) Faktur pembelian	5.344.000,00	0,00	X) 3.622.821.004,28
01 Nov 2024	Faktur Pembelian		(Pemasok Umum) Faktur pembelian	191.782.433,62	0,00	X) 3.819.603.437,90

Gambar 3. 20 Laman Buku Besar Rinci Persediaan Bahan Baku

- Berdasarkan Gambar 3.20, pada laman buku besar - rinci, di tanggal 1 November 2024, tercatat transaksi yang bersumber dari faktur pembelian dengan nomor sumber JP/PTH/24/11/001, mempunyai keterangan (Pemasok Umum) Faktur Pembelian: JP/PTH/24/11/001, nilai debit sebesar Rp5.251.000, dan jumlah pembelian untuk transaksi pertama di tanggal 1 November 2024 sebesar Rp3.622.277.004,28.
12. Lanjutkan cara yang sama untuk membuat buku besar rinci akun pembelian di bulan Oktober-Desember 2024. Total transaksi pembelian persediaan yang di-*input* sebanyak (item)
13. Setelah selesai, pekerjaan ini akan diberikan kepada mentor untuk di-*review* kembali. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 8.

3. PT K

A. Membuat Efaktur PPN

Membuat Efaktur PPN merupakan proses pembuatan faktur pajak elektronik untuk periode tertentu berdasarkan nilai penjualan, yang nantinya akan dihitung kembali untuk memperoleh Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain pada kode pajak tertentu, serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tujuan membuat Efaktur PPN adalah untuk memudahkan pelaporan faktur pajak. Dalam proses penerbitan pelaporan faktur pajak, wajib pajak perlu menggunakan *passphrase* atau kata sandi untuk mendapatkan status *approved*. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah rekapan Efaktur pajak, NPWP, dan *password* Coretax PT K yang didapat dari mentor. Kegiatan membuat Efaktur PPN dilakukan sebanyak 7 transaksi di bulan Februari 2025. Berikut langkah-langkah dalam membuat Efaktur PPN:

a) Menerima rekapan permintaan pembuatan Efaktur pajak

PT K				
FORM PERMINTAAN PEMBUATAN E FAKTUR PAJAK				
MASA FEBRUARI 2025				
Bersama dengan ini kami sampaikan permohonan pembuatan e Faktur Pajak dengan data sebagai berikut :				
NO	Nama Toko	NAMA Lawan Transaksi	NPWP	ALAMAT
1	PT K	PT Z	03.000.000.0-000.000	JL. ABC, TANGERANG
2	PT K	PT Z	03.000.000.0-000.000	JL. ABC, TANGERANG
3	PT K	PT Z	03.000.000.0-000.000	JL. ABC, TANGERANG
4	PT K	PT Z	03.000.000.0-000.000	JL. ABC, TANGERANG
5	PT K	PT Z	03.000.000.0-000.000	JL. ABC, TANGERANG
6	PT K	PT Z	03.000.000.0-000.000	JL. ABC, TANGERANG
7	PT K	PT Z	03.000.000.0-000.000	JL. ABC, TANGERANG
Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya.				
Mengetahui,				
Mr R				

TGL INVOICE	DPP	PPN
28/02/2025	800,000	88,000
28/02/2025	800,000	88,000
28/02/2025	800,000	88,000
28/02/2025	800,000	88,000
28/02/2025	1,574,100	173,151
28/02/2025	1,562,709	171,898
28/02/2025	9,000,000	990,000
BALARAJA, 03 Maret 2025		
Yang membuat,		
Mr G		

Gambar 3. 21 Rekapan Permintaan Faktur Pajak

Berdasarkan Gambar 3.21, diketahui PT K mempunyai transaksi penyerahan barang kepada PT Z yang memiliki nomor NPWP 030000000000000000 dan beralamat di Jl. Abc, Tangerang. Transaksi tersebut dilakukan pada tanggal 28 Februari 2025, dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp9.000.000 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp990.000 ($Rp9.000.000 \times 11\%$).

b) Membuat Efaktur pajak ke dalam Coretax sebagai berikut:

1. Buka <https://coretaxdjp.pajak.go.id/> di browser.
2. Isi “ID Pengguna” [1] berupa NPWP.
3. Isikan “Kata Sandi [2] yang telah diberi mentor.
4. Masukkan “Captcha” [3] yang telah muncul di laman awal Coretax.
5. Lalu, klik “Login” [4].

Gambar 3. 22 Tampilan Awal Coretax

6. Kemudian, pilih “e-Faktur” [5] pada menu tampilan utama Coretax.



Gambar 3. 23 Tampilan Utama Menu Coretax

7. Setelah masuk ke laman e-Faktur, pilih submenu “Pajak Keluaran” [6], lalu klik “Buat Faktur” [7].



Gambar 3. 24 Tampilan Awal Submenu Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.24, pemilihan submenu “Pajak Keluaran” [6] dilakukan karena transaksi yang akan dibuat merupakan transaksi penjualan dari PT K ke PT Z.

8. Setelah klik “Buat Faktur” [7], akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 3. 25 Form Faktur Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.25, *form* faktur pajak keluaran bagian dokumen transaksi diisi berdasarkan komponen yang ada pada rekapan permintaan faktur pajak Gambar 3.21, sebagai berikut:

- a. Pada “Kode Transaksi” [8], masukkan kode 04 - DPP Nilai Lain. Kode faktur pajak 04 digunakan untuk transaksi yang termasuk Barang Kena Pajak (BKP) yang PPN-nya dipungut oleh penjual.
 - b. Pada “Tanggal Faktur” [9], isi kolom sesuai dengan rekapan pada Gambar 3.21 yaitu 28 Februari 2025.
 - c. Untuk kolom jenis faktur, masa pajak, tahun, dan alamat akan terisi secara otomatis berdasarkan pengaturan yang telah dibuat oleh mentor. Sedangkan, kolom IDTKU terisi secara otomatis berdasarkan sistem Coretax. Meskipun secara otomatis telah terisi, pastikan kode IDTKU berkode 000000, yang menandakan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk perusahaan pusat.
9. Setelah mengisi *form* faktur pajak keluaran bagian dokumen transaksi, isi bagian *form* faktur pajak keluaran bagian informasi pembeli dengan tampilan sebagai berikut:

The screenshot shows a web form titled "Informasi Pembeli" (Buyer Information). It includes the following fields and values:

- NPWP ***: 0300000000000000 (highlighted with a red box and a black circle with the number 10)
- ID**: 10 (highlighted with a black circle with the number 10)
- Negara**: Indonesia (dropdown menu)
- NPWP / Paspor**: ☒ NPWP
- NIK / Identitas Lain**: ☐ NIK, ☐ Identitas Lain
- Nomor Dokumen**: (empty field)
- Nama**: PT Z
- Alamat ***: Jl. Abe, Tangerang
- IDTKU ***: 000000 (highlighted with a red box and a black circle with the number 11)
- Email**: amin@gmail.com

Below the form is a section titled "Detail Transaksi" (Transaction Details).

Gambar 3. 26 Form Faktur Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.26, *form* faktur pajak keluaran bagian informasi pembeli diisi berdasarkan komponen yang ada pada rekapan permintaan faktur pajak Gambar 3.21, sebagai berikut:

- a. Pada kolom “NPWP” [10], isi nomor NPWP dengan nomor 0300000000000000. Setelah nomor NPWP terintegrasi Coretax, kolom nama, alamat, IDTKU, dan Email akan terisi secara otomatis.
 - b. Pada kolom “IDTKU” [11], pilih kode 000000, yang artinya transaksi pembelian tersebut dilakukan dengan perusahaan pusat.
10. Setelah mengisi *form* faktur pajak keluaran bagian informasi pembeli, klik “Tambah Transaksi” [12] pada bagian detail transaksi.

Gambar 3. 27 Form Faktur Pajak Keluaran

11. Setelah klik “Tambah Transaksi” [12], akan muncul tampilan sebagai berikut:

Total Harga	9.000.000,00
Potongan harga	0,00

Gambar 3. 28 Form Faktur Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.28, bagian detail transaksi diisi berdasarkan komponen yang ada pada rekapan permintaan faktur pajak Gambar 3.21, sebagai berikut:

- Pada “Tipe” transaksi [13], pilih tipe jasa dikarenakan transaksi ini termasuk ke dalam ekspedisi.
- Pada “Kode” transaksi [14], pilih kode 000000 - Jasa, yang akan terhubung secara otomatis dengan kolom “Nama”.
- Pada kolom “Satuan” [15], pilih lainnya, dikarenakan pilihan yang ada pada Coretax tidak sesuai dengan ekspedisi.
- Pada kolom “Harga Satuan” [16], masukkan angka Rp9.000.000 sesuai dengan isi rekapan pada Gambar 3.21.
- Pada kolom “Kuantitas” [17] diisi nilai 1, sehingga total harga yang diperoleh yaitu Rp9.000.000 ($Rp9.000.000 \times 1$).

- Selanjutnya, pada bagian detail transaksi PPN dan PPnBM, akan muncul tampilan sebagai berikut:

PPN dan PPnBM	
DPP	9.000.000,00
☒ DPP Nilai Lain/DPP	8.250.000,00
Tarif PPN	12%
PPN	990.000,00
Tarif PPnBM (%)	0,00
PPnBM	
Batal Simpan	
JUMLAH	

Gambar 3. 29 Form Faktur Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.29, bagian PPN dan PPnBM memerlukan perhitungan mandiri, dengan mengisi detail kolom sebagai berikut:

- a. Klik “DPP nilai lain/DPP” [18] dikarenakan transaksi ini menggunakan kode 04, yang mensyaratkan penggunaan DPP nilai lain.
 - b. Isi kolom DPP nilai lain senilai Rp8.250.000 ($\text{Rp}9.000.000 \times 11\% / 12\%$) yang dihitung secara manual. Berdasarkan nilai tersebut, dapat diperoleh nilai PPN sebesar Rp990.000 ($\text{Rp}8.250.000 \times 12\%$) yang akan terisi secara otomatis oleh Coretax.
 - c. Untuk kolom tarif PPN akan terisi secara otomatis sebesar 12%.
 - d. Klik “Simpan” [19] untuk menyimpan detail transaksi.
13. Cek kembali detail transaksi yang telah di-*input*, mulai dari tipe hingga DPP nilai lain. Setelah semua dipastikan benar, klik “Simpan Konsep” [20] untuk menyimpan faktur.

Gambar 3. 30 Form Faktur Pajak Keluaran

14. Setelah klik “Simpan Konsep” [20], akan muncul tampilan sebagai berikut:

The screenshot displays a web application for managing tax invoices. It is divided into three main sections, each with a header bar containing buttons for '+ Buat Faktur', 'Impor Data', 'XML Monitoring', and 'Hapus Dokumen'.

Section 1: Transaction Details

NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Kode Transaksi	Nomor Faktur Pajak
0300000000000000	PT Z	04 - DPP Nilai Lain	

Section 2: Invoice Details

Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	Tahun	Status Faktur
	28-02-2025	Februari	2025	CREATED

Section 3: Summary Table

ESignStatus	Harga Jual/Penggantian/DPP	DPP Nilai Lain/DPP	PPN	PPnBM
	9.000.000	8.250.000	990.000	

Gambar 3. 31 Laman Pajak Keluaran

Berdasarkan Gambar 3.31, menunjukkan hasil Efaktur PPN untuk tanggal 28 Februari 2025. Faktur yang berhasil dibuat, akan diberi status *created*, yang artinya faktur tersebut masih di dalam *draft* dan belum ter-*upload*.

15. Lakukan cara yang sama untuk membuat Efaktur PPN di bulan Februari 2025 sebanyak 6 transaksi lainnya.

16. Setelah selesai, pekerjaan ini akan dikonfirmasi kembali kepada mentor. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

4. PT N

A. Membuat ID *Billing* PPh 23

Membuat ID *Billing* PPh 23 merupakan proses pembuatan kode pembayaran yang digunakan untuk membayar pajak terutang berdasarkan jumlah nilai bruto atas penghasilan jasa di periode tertentu. Tujuan membuat ID *Billing* PPh 23 adalah untuk mendapat dokumen administrasi bukti pemotongan pajak penghasilan yang dapat dikreditkan dalam SPT Masa, sehingga wajib pajak tidak dikenakan pajak

berganda. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah rekapan kuitansi ekspedisi ongkos kirim, NPWP PT N dan PT Maju Selalu (klien), *password* Coretax serta *passphrase* (kata sandi) PT N yang didapat dari mentor. Penyusunan ID *Billing* PPh 23 dilakukan untuk 3 transaksi dari bulan Desember 2024 - Januari 2025. Berikut langkah-langkah dalam membuat ID *Billing* PPh 23:

a) Menerima rekapan kuitansi ekspedisi ongkos kirim

Tgl 19/12/2024-14/1/2025:				
Tanggal	Nomor Resi	Penerima	Nomor Kwitansi	Total
19 December 2024	712297	PT A ke Semarang	341/SCB/XII/24	206,625
26 December 2024	714235			174,800
27 December 2024	715359			649,200
27 December 2024	715360			120,000
02 January 2025	715704			107,825
04 January 2025	714261			120,000
04 January 2025	714262	PT B ke Madiun	028/SCB/I/25	389,400
06 January 2025	25106			276,000
07 January 2025	25397			142,500
07 January 2025	25394			145,200
07 January 2025	25395			331,200
09 January 2025	25932	PT C ke Surakarta	081/SCB/I/25	1,231,200
10 January 2025	26173			213,275
14 January 2025	26860			417,600
14 January 2025	26863			356,400
14 January 2025	26877			224,400
			TOTAL	5,105,625
			PPH 23 (2%)	102,113
			TOTAL BAYAR	5,003,513

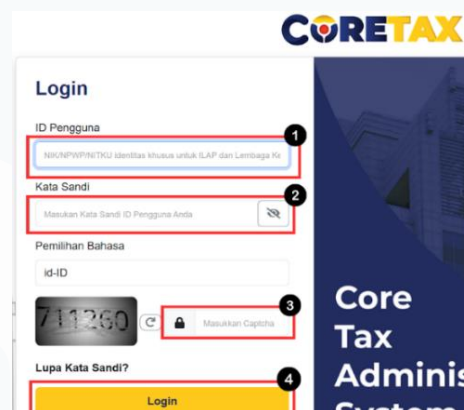
Gambar 3. 32 Rekapan Kuitansi Ekspedisi Ongkos Kirim

Berdasarkan Gambar 3.32, diketahui PT N mempunyai transaksi ekspedisi ongkos kirim ke beberapa perusahaan dari tanggal 19 Desember 2024-14 Januari 2025. Pada periode 19 Desember 2024-04 Januari 2025, PT N melakukan enam transaksi pengiriman ke PT A yang terletak di Semarang, dengan nomor kuitansi ekspedisi 341/SCB/XII/24 dan jumlah ongkos kirim senilai Rp1.378.450 (Rp206.625+ Rp174.800 + Rp649.200 + Rp120.000 + Rp107.825 + Rp120.000). Pada periode 04-07 Januari 2025, PT N melakukan lima transaksi pengiriman ke PT B yang terletak di Madiun, dengan nomor kuitansi ekspedisi 028/SCB/I/25 dan jumlah ongkos kirim sebesar Rp1.284.300 (Rp389.400 + Rp276.000 + Rp142.500 + Rp145.200 + Rp331.200). Pada periode 09-14 Januari 2025, PT N melakukan lima transaksi pengiriman ke PT B yang terletak di Surakarta, dengan nomor kuitansi ekspedisi 081/SCB/I/25 dan jumlah ongkos

kirim sebesar Rp2.442.875 (Rp1.231.200 + Rp213.275 + Rp417.600 + Rp356.400 + Rp224.400). Berdasarkan tiga periode transaksi ekspedisi dari tanggal 19 Desember 2024-14 Januari 2025, total biaya pengiriman mencapai Rp5.105.625. Dengan tarif PPh 23 yang dipotong sebesar 2% atau Rp102.113 (Rp5.105.625 x 2%), sehingga total yang harus dibayar kepada pihak ekspedisi setelah dipotong pajak sebesar Rp5.003.513 (Rp5.105.625 - Rp102.113).

b) Membuat ID Billing di Coretax sebagai berikut:

1. Buka <https://coretaxdjp.pajak.go.id/> di *browser*.
2. Isi “ID Pengguna” [1] berupa NPWP.
3. Isikan “Kata Sandi” [2] yang telah diberi mentor.
4. Masukkan “Captcha” [3] yang telah muncul di laman awal Coretax.
5. Lalu, klik “Login” [4].



Gambar 3. 33 Tampilan Awal Coretax

6. Setelah itu, akan muncul tampilan utama menu Coretax seperti pada Gambar 3.34. Kemudian, pilih “Surat Pemberitahuan (SPT)” [5], lalu pilih submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)” [6].



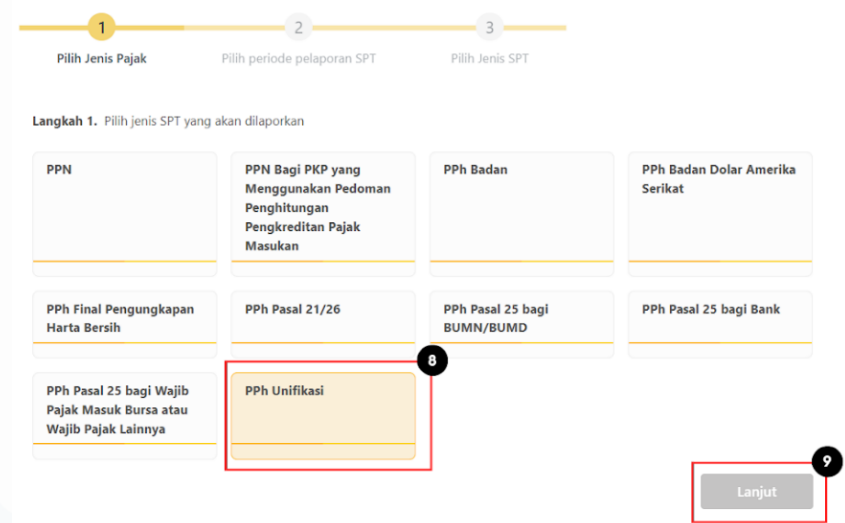
Gambar 3. 34 Tampilan Utama Menu Coretax

7. Pada laman awal submenu Surat Pemberitahuan (SPT), klik “Buat Konsep SPT” [7] untuk memulai penyusunan SPT di bulan baru sebagai dasar pembuatan ID Billing.



Gambar 3. 35 Tampilan Awal Submenu SPT

8. Pada tahap 1 buat konsep SPT, pilih kolom “PPh Unifikasi” [8]. Setelah itu, klik “Lanjut” [9].



Gambar 3. 36 Tampilan Buat Konsep SPT

9. Pada tahap 2 buat konsep SPT, isi masa “Februari 2025” [10] pada kolom periode dan tahun pajak. Setelah itu, klik “Lanjut” [11].

Gambar 3. 37 Tampilan Buat Konsep SPT

10. Pada tahap 3 buat konsep SPT, pilih kategori “Normal” [12] pada model SPT. Setelah itu, klik “Buat Konsep SPT” [13].

Gambar 3. 38 Tampilan Buat Konsep SPT

11. Selanjutnya, kembali ke tampilan utama menu Coretax, pilih “eBupot” [14], lalu klik submenu “BPPU” [15] atau Bukti Potong Pajak Unifikasi.



Gambar 3. 39 Tampilan Utama Menu Coretax

12. Pada tampilan awal submenu “BPPU” [15], klik “Create eBupot BPU” [16] atau Bukti Pemotongan Unifikasi untuk membuat bukti pemotongan PPh 23 yang baru.



Gambar 3. 40 Tampilan Awal Submenu BPPU

13. Setelah klik “*Create eBupot BPU*” [16], akan muncul tampilan sebagai berikut:

Gambar 3. 41 Form EBUPOT BPU

Berdasarkan Gambar 3.41, bagian informasi umum diisi dengan detail sebagai berikut:

- Kolom “Masa Pajak” dan “Status” akan terisi secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah dibuat saat buat konsep SPT.
- Isi kolom “NPWP” [17] dengan nomor NPWP lawan transaksi 0XXXXXXXXXXXXXXXXX. Selanjutnya, kolom “Nama” akan terisi secara otomatis setelah NPWP terintegrasi oleh Coretax.
- Pilih kode 000000 pada kolom “NITKU” [18]. Kode 000000 pada kolom NITKU menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan perusahaan pusat.

14. Setelah mengisi bagian informasi umum, isi bagian Pajak Penghasilan (PPh) dengan tampilan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Rp)	
Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan*	Tanpa Fasilitas ¹⁹
Nama Objek Pajak*	Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan ²⁰
Jenis Pajak*	Pasal 23
Kode Objek Pajak*	24-104-56
Sifat Pajak Penghasilan*	Tidak Final
Dasar Pengenaan Pajak (Rp)*	5.105.625 ²¹
Tarif (%)	2,00
Pajak Penghasilan (Rp)*	102.113
KAP*	411124-100

Gambar 3. 42 Form EBUPOT BPU

Berdasarkan Gambar 3.42, bagian Pajak Penghasilan (PPh) diisi berdasarkan rekapan kuitansi ekspedisi ongkos kirim pada Gambar 3.32 sebagai berikut:

- Pada kolom “Fasilitas Pajak yang Dimiliki oleh Penerima Penghasilan” [19], pilih kategori tanpa fasilitas.
- Pada kolom “Nama Objek Pajak” [20], pilih Jasa Pengangkutan/Ekspedisi Kecuali Yang Telah Diatur Dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Untuk kolom jenis pajak, kode objek pajak, dan sifat pajak penghasilan akan terisi secara otomatis oleh Coretax.
- Pada kolom “Dasar Pengenaan Pajak” [21], isi nilai transaksi sebesar Rp5.105.625. Kolom tarif akan terisi secara otomatis yaitu 2%, sehingga pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp102.113 ($Rp5.105.625 \times 2\%$).
- Untuk kolom KAP (Kode Akun Pajak), kode 411124-100 akan terisi secara otomatis. Kode 411124-100 menunjukkan bahwa kode tersebut termasuk jenis setoran masa PPh Pasal 23.

15. Setelah mengisi bagian Pajak Penghasilan (PPh), isi bagian dokumen referensi dengan tampilan sebagai berikut:

Dokumen Referensi	
Jenis Dokumen*	Surat Tagihan
Nomor Dokumen*	341/SCB/XII/24
Tanggal Dokumen*	28-12-2024
NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi*	001XXXXXXXXXXXX000000 - PT N

Submit Go to search

Gambar 3. 43 Form EBUPOT BPU

Berdasarkan Gambar 3.43, bagian dokumen referensi diisi berdasarkan rekapan kuitansi ekspedisi ongkos kirim pada Gambar 3.32 sebagai berikut:

- Isi kolom “Jenis Dokumen” [22] dengan surat tagihan.
- Isi “Nomor Dokumen” [23] dengan 341/SCB/XII/24.
- Isi “Tanggal Dokumen” [24] dengan 28 Desember 2024.
- Pada kolom “NITKU” [25], pilih kode unik 000000 yang menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan perusahaan pusat. Setelah itu, klik “Submit” [26] untuk meng-*upload form* BPU.

- Lanjutkan cara yang sama untuk membuat eBupot PPh 23 di bulan Februari 2025 sebanyak tiga bukti potong.
- Selanjutnya, pada laman awal submenu eBupot BPU, klik tanda centang [27] untuk meng-*upload* seluruh *form* BPU yang telah dibuat. Lalu, klik “Terbitkan” [28].

EBUPOT BPU NOT ISSUED

Close Advanced Filter Create ebupot BPU Hapus Terbitkan

Filter Tax Year & ID Place of Business Activity

Tax Year: 2025

NITKU/Nomor Identitas Sub Unit Organisasi: Please Select ID Place of Business Activity

Apply Filter

Masa Pajak	Nomor Pemotongan	Status	Status Tanda Tangan Elektronik
Pilih Masa Pajak		Pilih Status	
Februari 2025		Dilampirkan	
Februari 2025		Dilampirkan	

Gambar 3. 44 Tampilan Awal Submenu BPPU

18. Setelah klik “Terbitkan” [28], akan muncul tampilan konfirmasi tanda tangan sebagai berikut:

Sign Document

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan*

Penyedia Penandatanganan*

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Tanda Tangan Pembayar Pajak

Kode Otorisasi DJP

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Konfirmasi Tanda Tangan

Gambar 3. 45 Tampilan Laman Konfirmasi Tanda Tangan

Berdasarkan Gambar 3.45, untuk dapat menerbitkan form eBupot BPU, diperlukan konfirmasi tanda tangan direktur PT N dengan mengisi kolom “Kata Sandi Penandatanganan” [29], lalu klik “Konfirmasi Tanda Tangan” [30] agar *form* tersebut dapat *ter-upload* di SPT.

19. Selanjutnya, pada pilihan menu di Coretax, pilih “Surat Pemberitahuan (SPT)” [31], lalu klik submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)” [32] untuk melanjutkan pembuatan ID *Billing* PPh 23.



Gambar 3. 46 Tampilan Awal Submenu BPPU

20. Pada tampilan utama submenu SPT, klik baris PPh Unifikasi masa Februari 2025 [33].

Gambar 3. 47 Tampilan Utama Submenu SPT

21. Setelah klik baris PPh Unifikasi masa Februari 2025 [33], akan muncul tampilan laman SPT Masa PPh Unifikasi sebagai berikut:

NO	DETIL	PAJAK PENGHASILAN	PAJAK PENGHASILAN	PAJAK PENGHASILAN	PAJAK PENGHASILAN	PAJAK PENGHASILAN
		DEBIT KURANG	KREDIT KURANG	PAJAK PENGHASILAN	PAJAK PENGHASILAN	PAJAK PENGHASILAN
1	Pasal 4 Ayat 2 KJS:411122-100	0	0	0	0	0
3	Pasal 22 KJS:411122-100	0	0	0	0	0
	KJS:411122-900	0	0	0	0	0
	KJS:411122-910	0	0	0	0	0
4	Pasal 23 KJS:411124-100	0	342.113	342.113	0	342.113
5	Pasal 26 KJS:411127-110	0	0	0	0	0
TOTAL OF INCOME TAX		0	342.113	342.113	0	342.113

Gambar 3. 48 Form SPT Masa PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.48, bagian identifikasi pemotong telah terisi secara otomatis, yang meliputi bahwa SPT dilaporkan untuk masa Februari 2025, dengan NPWP bernomor 001XXXXXXXXXXXX, nama lengkap PT N, beralamat di Jalan ABC Blok A Jakarta Pusat, serta memiliki nomor telepon yang tercatat yaitu 08XXXXXXXXXX. Selanjutnya, di kolom Pasal 23 telah terisi secara otomatis pajak penghasilan pemotongan sebesar Rp342.113 (berasal dari tiga bukti potong lainnya) dari kumpulan PPh unifikasi yang telah dibuat.

22. Setelah memastikan data yang ada pada Gambar 3.48 telah terisi dengan benar, isi bagian pernyataan dan tanda tangan dengan tampilan sebagai berikut:

C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

☒ Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritah dan jelas.

Penandatanganan

NPWP/NIK 3XXXXXXXXXXXXXXXXX

Nama Tanda Tangan HAJJA

Tanda Tangan

Bayar dan Lapor

Pergi ke pencarian

Gambar 3. 49 Form SPT Masa PPh Unifikasi

Berdasarkan Gambar 3.49, klik pernyataan pada kotak centang, lalu klik “Wajib Pajak” [34] di baris penandatanganan dan di baris “NPWP/NIK” [35], isi dengan NPWP direktur PT N yaitu 3XXXXXXXXXXXXXXXXX. Lalu, nama “Tanda Tangan” [36], akan terisi secara otomatis setelah NPWP terintegrasi.

23. Klik “Bayar dan Lapor” [37] untuk melanjutkan ke tahap konfirmasi.
24. Setelah itu, pada bagian tanda tangan dokumen untuk konfirmasi ID *Billing*, isi “Kata Sandi Penandatanganan” [38], lalu klik “Simpan” [39], dan “Konfirmasi Tanda Tangan” [40].

Tanda Tangan Dokumen

Tanda Tangan

Jenis Penandatanganan

Pembuat Penandatanganan

ID Penandatanganan

Kata Sandi Penandatanganan

Tanda Tangan Pemisahan Pajak

Kode Otentikasi DIP

317500908700019

Simpan

Konfirmasi Tanda Tangan

Gambar 3. 50 Tampilan Laman Konfirmasi Tanda Tangan

25. Setelah klik “Konfirmasi Tanda Tangan” [40], ID *Billing* PPh 23 secara otomatis akan ter-*download* dengan tampilan sebagai berikut:

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
0123000000000000

NPWP
000XXXXXXXXXXXXX
NAMA
PT N
ALAMAT
JALAN ABC BLOK A, JAKARTA PUSAT

MATA UANG : IDR
NOMINAL : 342.113,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411124-100	02022025	-	-	Rp342.113,00
TOTAL				Rp342.113,00

Terbilang: Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah

URAIAN:

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 0123000000000000
MASA AKTIF : 21/03/2025 15:00:33

Gambar 3. 51 Tampilan ID *Billing* PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.51, terdapat kode *billing* dengan nomor 0123000000, NPWP bernomor 001XXXXXXXXXXXXX, dengan pemilik kode *billing* bernama PT N, beralamat di Jalan ABC Blok A, Jakarta Barat, menggunakan mata uang IDR, dengan nominal PPh23 terutang sebesar Rp342.113, dan jumlah detail pajak terutang 1.

Berdasarkan transaksi pembuatan ID *Billing* PPh 23, PT N sebagai pihak yang membayar ongkos kirim ke ekspedisi mempunyai kewajiban untuk memotong dan menyetor pajak sebesar 2% dari jumlah bruto. Pihak ekspedisi nantinya akan menerima bukti potong sebagai pengurang pajak di akhir tahun.

26. Setelah selesai, ID *Billing* yang berhasil ter-*download* akan dikirim kepada mentor. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 10.

5. PT R

A. Menyusun rekapitulasi rekening giro

Menyusun rekapitulasi rekening giro merupakan proses mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran yang terjadi dalam satu periode. Tujuan rekapitulasi rekening giro adalah untuk mempermudah pembacaan perbedaan arus kas masuk

Rp20.000).

Menerima format rekapitulasi dalam bentuk *Ms Excel*

A	B	D
Jurnal Voucher	Tanggal	Keterangan

E	F	G
Keluar	Masuk	Saldo

Gambar 3. 53 Format Rekapitulasi Rekening Giro

[illegible]

Berdasarkan Gambar 3.53, format rekapitulasi rekening giro berisi jurnal voucher, tanggal, keterangan, keluar (bank keluar), masuk (bank masuk), dan saldo.

Melakukan rekapitulasi rekening giro dengan hasil sebagai berikut:

A	B	C	D
Jurnal Voucher	Tanggal	Status	Keterangan
	01-Nov	SALDO AWAL	
BM/PTB/24/11/001	01-Nov	TRSF E-BANKING CR	PT MEGAH
	01-Nov	KR OTOMATIS	
BM/PTB/24/11/002			PT KAYA
BK/PTB/24/11/001	02-Nov	BIAYA ADMIN BDC	BIAYA ADMIN BDC

E	F	G
Keluar	Masuk	Saldo
		521.554,59
	1.800.000,00	523.354,59
	22.100.000,00	545.454,59
20.000,00		545.434,59

Jurnal Voucher	Tanggal	Status	Keterangan
	01-Nov	SALDO AWAL	
BAI/PTK/24/11/001	01-Nov	TRSF E-BANKING CR	PT MEGAH
BAI/PTK/24/11/002	01-Nov	KR OTOMATIS	PT KAYA
BKI/PTK/24/11/001	02-Nov	BIAYA ADMIN BDC	BIAYA ADMIN BDC

Keluar	Masuk	Saldo
		521.554.597,54
	1.800.000,00	523.354.597,54
	22.100.000,00	545.454.597,54
20.000,00		545.434.597,54

94

Laporan Kerja Magang..., Martiza Febriani, Universitas Multimedia Nusantara

Berdasarkan Gambar 3.54, format rekapitulasi diisi sesuai dengan lampiran rekening Giro pada Gambar 3.52 seperti berikut:

- a. Membuat kode jurnal voucher untuk membedakan transaksi bank masuk dan bank keluar. Transaksi bank masuk akan diberi kode BM/Kode Perusahaan/Tahun/Bulan/Nomor Urut dengan hasil contoh kode bank masuk yaitu BM/PTR/24/11/001. Adapun transaksi bank keluar akan diberi kode BK/Kode Perusahaan/Tahun/Bulan/Nomor Urut dengan hasil contoh kode bank masuk yaitu BK/PTR/24/11/001. Pembuatan kode ini akan mempermudah *tracking* transaksi yang terlewat saat proses *input*, sehingga kolom jurnal voucher diisi dengan BM/PTR/24/11/002.
 - b. Mengisi bagian tanggal dengan 01/11
 - c. Mengisi bagian status dengan KR Otomatis
 - d. Mengisi bagian keterangan dengan PT Kaya
 - e. Mengisi bagian masuk (bank masuk) sebesar Rp22.100.000, sehingga hasil akhir saldo Bank BCA 3210000000 di tanggal 1 November sebesar Rp545.454.597,54 (Rp523.354.597,54 + Rp22.100.000).
- d) Melakukan cara yang sama seperti tahap poin (3) untuk menyusun rekapitulasi rekening giro. Setelah pekerjaan selesai, dokumen akan diberikan kepada mentor untuk di-*review* terlebih dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 11.

6. PT C

A. Rekonsiliasi PPN

Membuat rekonsiliasi PPN merupakan proses pencocokan data antara laporan PPN yang disusun oleh perusahaan dengan data yang tercatat di dalam Coretax. Tujuan membuat rekonsiliasi PPN adalah untuk memastikan seluruh transaksi penjualan yang dikenakan PPN telah dan akan dilaporkan secara akurat, agar saat pelaporan SPT Masa PPN dilakukan, tidak terdapat perbedaan data yang dapat menimbulkan potensi koreksi atau sanksi pajak. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan magang

pengerjaan rekonsiliasi PPN dilakukan dengan menemukan perbedaan antara rekapitulasi *general ledger* dan rekapitulasi faktur penjualan. Dokumen yang diperlukan untuk membuat rekonsiliasi PPN adalah rekapitulasi *general ledger* penjualan dan rekapitulasi faktur penjualan yang diimpor dari Coretax, yang diperoleh dari mentor. Kegiatan membuat rekonsiliasi PPN dilakukan dari bulan Maret-April 2025. Berikut tahapan dalam membuat rekonsiliasi PPN dengan contoh di bulan April 2025:

a. Menerima rekapitulasi *general ledger* penjualan

No.	Biz	Customer	Invoice Date
1	Sea Import	PT R	07-Apr-2025
2	Sea Import		07-Apr-2025
3	Sea Export		07-Apr-2025
4	Sea Import		08-Apr-2025
5	Sea Import		08-Apr-2025
6	Sea Import		08-Apr-2025
7	Sea Import		09-Apr-2025
8	Sea Import		09-Apr-2025
9	Sea Import		09-Apr-2025
10	Sea Import		09-Apr-2025

Amount (IDR)	VAT(IDR)	Awb / BL No.	Invoice No.
10,581,000.00	1,163,910.00	PTCTGR011	0004
15,496,500.00	1,704,615.00		0005
828,000.00	91,080.00		0006
3,207,750.00	352,852.00		0008
4,529,850.00	498,283.00		0009
3,207,750.00	352,852.00		0010
10,581,000.00	1,163,910.00		0012
3,207,750.00	352,852.00		0011
3,193,250.00	351,257.00		0013
300,000.00	33,000.00		0014

Gambar 3. 55 Rekapitulasi *General Ledger* Penjualan

Berdasarkan Gambar 3.55, diketahui rekapitulasi *general ledger* penjualan di bulan April 2025 memiliki *template* kolom yang berisi nomor, biz atau jenis aktivitas operasional transaksi, nama *customer*, tanggal *invoice*, jumlah tagihan atau DPP, nilai PPN, nomor dokumen, dan nomor *invoice*. Pada rekapitulasi *general ledger* terdapat bagian “Awb/BL No.” yang memiliki arti, di antaranya; **Awb** (*air waybill*) untuk dokumen yang dikirim

melalui udara, **BL** (*Bill of Lading*) untuk dokumen yang dikirim melalui laut, dan **No.** yang merupakan nomor dokumen. Sebagai contoh, pada transaksi pertama, PT C mempunyai transaksi dengan jenis aktivitas operasional *sea import* kepada PT R di tanggal 7 April 2025, dengan jumlah tagihan sebesar Rp10.581.000 dan nilai PPN sebesar Rp1.163.910. Transaksi tersebut mempunyai nomor dokumen PTCTGR011 dan nomor *invoice* 0004.

- b. Menerima rekapitulasi faktur penjualan di Coretax

NPWP Pembeli / Identitas lainnya	Nama Pembeli	Tanggal Faktur Pajak	Status Faktur
090000000000000000	PT Q *****	2025-04-07T00:00:00	CREATED
		2025-04-07T00:00:00	APPROVED
		2025-04-07T00:00:00	APPROVED
		2025-04-08T00:00:00	CREATED
		2025-04-08T00:00:00	APPROVED

Harga Jual/Penggantian/DPP	PPN	Referensi	No. Invoice
828,000	91,080	PTCTGR001	0006
10,581,000	1,163,910		0004
15,496,500	1,704,615		0005
4,529,850	498,283		0009
3,207,750	352,852		0010

Gambar 3. 56 Rekapitulasi Faktur Keluaran Coretax

Berdasarkan Gambar 3.56, diketahui rekapitulasi faktur keluaran yang di dapat dari Coretax mempunyai *template* kolom yang berisi NPWP pembeli, nama pembeli, tanggal faktur pajak, status faktur, harga jual atau DPP, PPN, nomor referensi atau nomor dokumen, serta nomor *invoice*. Sebagai contoh, pada transaksi pertama, terdapat NPWP pembeli dengan nomor 09.000.000.0-000.000, nama pembeli PT Q, tanggal faktur pajak tertanggal 7 April 2025, nilai harga jual sebesar Rp828.000, PPN yang dikenakan sebesar Rp91.080, nomor referensi atau dokumen PTCTGR001, dan nomor *invoice* 0006.

- c. Menyiapkan *sheets* kosong untuk membuat rekonsiliasi PPN



The screenshot shows the application's main menu bar. On the left, there are icons for a plus sign and a hamburger menu. To the right of these icons are three menu items: 'Faktur' with a downward arrow, 'Accurate' with a downward arrow, and 'Rekon PPN' with a downward arrow. The 'Rekon PPN' item is highlighted with a blue background.

Gambar 3. 57 *Sheets* Rekon PPN

Berdasarkan Gambar 3.57, *sheets* rekon PPN perlu dibuat sebagai langkah awal untuk melakukan rekonsiliasi PPN. Nantinya, rekapitulasi *general ledger* penjualan dan rekapitulasi faktur pajak keluaran yang didapat dari Coretax akan disajikan dalam satu *sheets* ini, dengan contoh tampilan sebagai berikut:

ACCURATE (GL)						
No.	Biz	Customer	Amount (IDR)	VAT(IDR)	Awb / BL No.	Invoice No.
1	Sea Import	PT R	10,581,000.00	1,163,910.00	PTCTGROII	0004
2	Sea Import		15,496,500.00	1,704,615.00		0005
3	Sea Export		828,000.00	91,080.00		0006
4	Sea Import		3,207,750.00	352,852.00		0008
5	Sea Import		4,529,850.00	498,283.00		0009
6	Sea Import		3,207,750.00	352,852.00		0010
7	Sea Import		10,581,000.00	1,163,910.00		0012
8	Sea Import		3,207,750.00	352,852.00		0011
9	Sea Import		3,193,250.00	351,257.00		0013
10	Sea Import		300,000.00	33,000.00		0014
11	Sea Import		2,064,650.00	227,111.00		0021

Faktur Accurate Rekon PPN

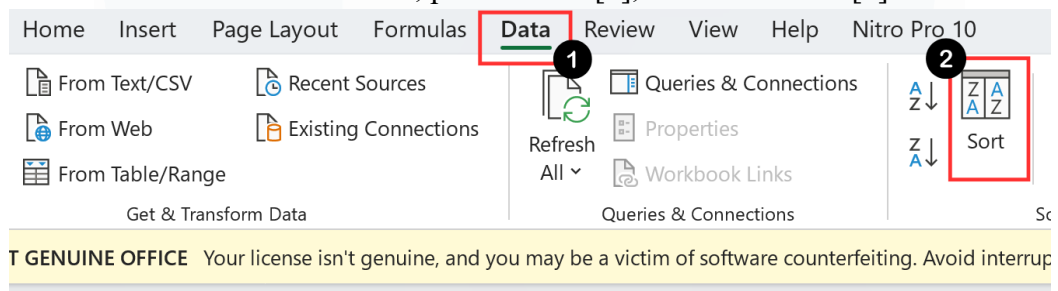
Berdasarkan Gambar 3.58, terdapat rekapitulasi *general ledger* per

Berdasarkan Gambar 3.58, terdapat rekapitulasi *general ledger* penjualan yang telah di *copy* dan diberi judul “**Accurate (GL)**”. Adapun kolom yang akan digunakan untuk rekonsiliasi PPN pada rekapitulasi *general ledger* penjualan, di antaranya nomor, biz atau jenis aktivitas operasional transaksi, nama *customer*, jumlah transaksi, PPN, nomor dokumen, dan nomor *invoice*. Kolom *invoice date* seperti pada Gambar 3.55 di-*hide* terlebih dahulu, guna mempermudah penyamaan nilai.

ACCURATE (GL)						
No.	Biz	Customer	Amount (IDR)	VAT(IDR)	Awb / BL No.	Invoice No.
1	Sea Import	PT R	10.581.000,00	1.163.910,00	PTCTGR011	0004
2	Sea Import		15.496.500,00	1.704.615,00		0005
3	Sea Export		828.000,00	91.080,00		0006
4	Sea Import		3.207.750,00	352.852,00		0008
5	Sea Import		4.529.850,00	498.283,00		0009
6	Sea Import		3.207.750,00	352.852,00		0010
7	Sea Import		10.581.000,00	1.163.910,00		0012
8	Sea Import		3.207.750,00	352.852,00		0011
9	Sea Import		3.193.250,00	351.257,00		0013
10	Sea Import		300.000,00	33.000,00		0014
11	Sea Import		2.064.650,00	227.111,00		0021

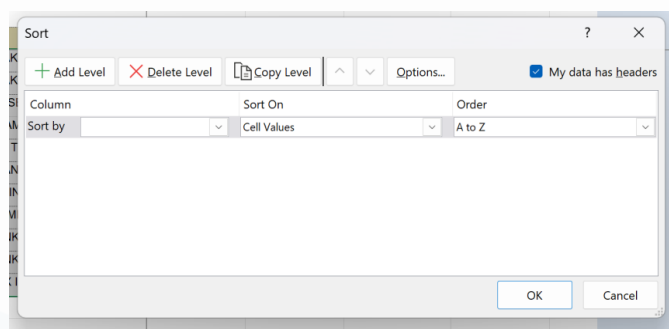
Gambar 3. 61 Tabel Accurate (GL)

2. Pada menu Excel, pilih “Data” [1], lalu klik “Sort” [2].



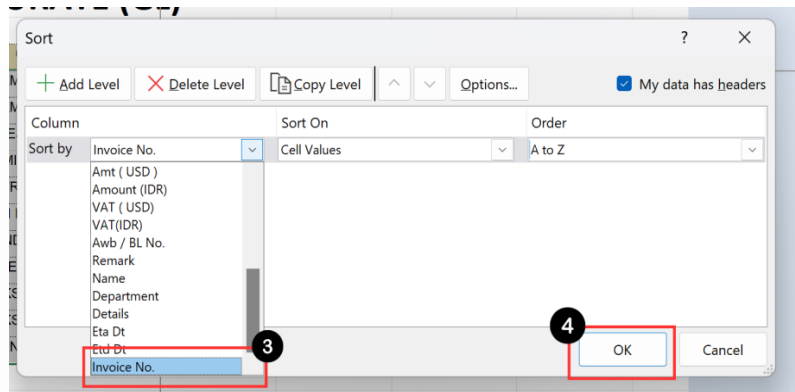
Gambar 3. 62 Menu Excel

3. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut



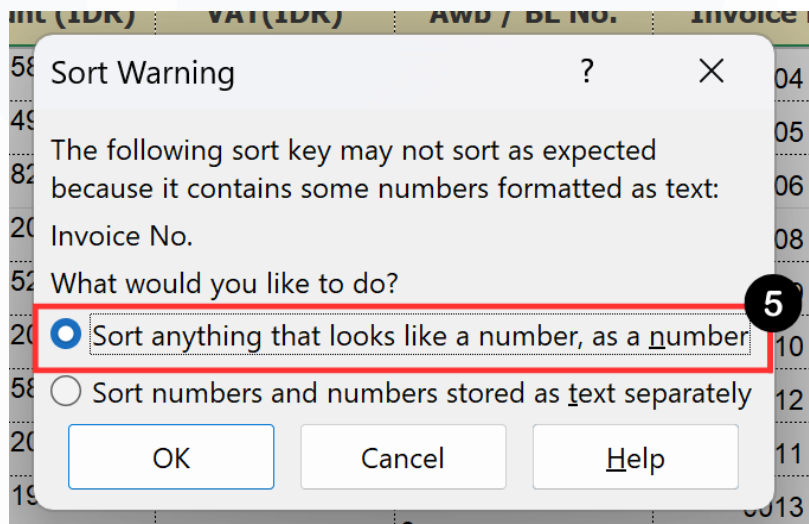
Gambar 3. 63 Tampilan Sort

4. Pada kolom *sort by*, pilih “Invoice No.” [3]. Pastikan di kolom *order* bagian yang ditampilkan yaitu “A to Z”. Setelah itu, klik “Ok” [4].



Gambar 3. 64 Bagian sort

5. Setelah klik “Ok” [4], akan muncul tampilan *sort warning*. Pilih “*sort anything that looks like a number, as a number*” [5].



Gambar 3. 65 Bagian sort

6. Berikut tampilan tabel “**Accurate (GL)**” setelah dilakukan *sort*:

A	B	C	N	P	Q	X
		ACCURATE (GL)				
No.	Biz	Customer	Amount (IDR)	VAT(IDR)	Awb / BL No.	Invoice No.
1	Sea Import	PT R	10.581.000,00	1.163.910,00	PTCTGR011	0004
2	Sea Import		15.496.500,00	1.704.615,00		0005
3	Sea Export		828.000,00	91.080,00		0006
4	Sea Import		3.207.750,00	352.852,00		0008
5	Sea Import		4.529.850,00	498.283,00		0009
6	Sea Import		3.207.750,00	352.852,00		0010
8	Sea Import		3.207.750,00	352.852,00		0011
7	Sea Import		10.581.000,00	1.163.910,00		0012
9	Sea Import		3.193.250,00	351.257,00		0013
10	Sea Import		300.000,00	33.000,00		0014

Gambar 3. 66 Tabel Accurate (GL)

Berdasarkan Gambar 3.66, Kolom *invoice number* yang terdapat pada tabel Accurate (GL), akan menampilkan angka berurut dari yang terendah hingga terbesar. Kolom lainnya yang ada di tabel “**Accurate (GL)**” akan mengikuti data yang telah di-*sort*.

7. Lakukan cara yang sama untuk tabel “**Faktur**”, sehingga tampilan yang tersaji setelah di *sort* sebagai berikut:

FAKTUR					
NPWP Pembeli /	Nama Pembeli	Harga Jual/Pen	PPN	Referensi	No. Invoice
021000000000000000	PT M	10.581.000	1.163.910	PTCTGR358	0004
		15.496.500	1.704.615		0005
		828.000	91.080		0006
		3.207.750	352.852		0008
		4.529.850	498.283		0009
		3.207.750	352.852		0010
		3.207.750	352.852		0011
		10.581.000	1.163.910		0012
		3.193.250	351.257		0013
		300.000	33.000		0014
		86.750	9.542		0015

Gambar 3. 67 Tabel Faktur

Berdasarkan Gambar 3.67, tabel “**Faktur**” yang sudah di-*sort* akan menampilkan angka yang berurut di kolom “No. Invoice” dari yang terendah hingga terbesar.

8. Langkah selanjutnya yaitu melakukan rekonsiliasi PPN berdasarkan nomor referensi, *invoice*, nilai DPP, dan PPN, dengan tampilan sebagai berikut:

Ref	No. inv	DPP	PPN
0	0	-	-
0	0	-	-
0	0	-	-
0	0	-	-
0	0	-	-
0	0	-	-
0	0	-	-
0	0	-	-

Gambar 3. 68 Tabel Perbandingan GL dan Faktur

Berdasarkan Gambar 3.68, untuk mengetahui adanya perbedaan antara data di *general ledger* dengan di faktur, perlu digunakan rumus Excel agar perbandingan dapat dilakukan secara otomatis dan akurat. Berikut penjelasan dari masing-masing kolom:

- Rumus IF(0;99) digunakan untuk kolom “**ref atau referensi**” dan “**No. inv**”, yang menunjukkan bahwa jika data pada tabel faktur dan *general ledger* mempunyai struktur yang sama, maka rumus IF(0;99) akan menghasilkan angka 0 sebagai tanda bahwa kondisi terpenuhi. Apabila kondisi tidak terpenuhi, maka wajib untuk membuat keterangan untuk ditanya kepada klien.
- Pada kolom “**DPP**” dan “**PPN**”, rumus yang digunakan untuk menghasilkan angka 0 adalah dengan membandingkan masing-masing nilai DPP atau PPN antara tabel *general ledger* dan faktur.

9. Berikut contoh rekonsiliasi yang memenuhi kondisi dan tidak memenuhi kondisi:

- Rekonsiliasi PPN yang memenuhi kondisi

- b. No. *Invoice*: Menggunakan rumus Excel IF(X20=AW20;0;99) yang mempunyai arti, jika nilai “X20 (0022)” sama dengan nilai “AV20 (0022)”, maka hasilnya 0, jika tidak sama hasilnya 99.
- c. DPP: Menggunakan rumus Excel “=N15-AN15”, yaitu selisih antara nilai pada kolom N15 dan AN15. Dikarenakan keduanya bernilai Rp3.193.250, maka hasil DPP untuk PT LR adalah 0.
- d. PPN: Menggunakan rumus Excel “=P15-AW15”, yaitu selisih antara nilai pada kolom P15 dan AW15. Dikarenakan keduanya bernilai Rp351.257, maka hasil DPP untuk PT LR adalah 0.

b) Rekonsiliasi PPN yang tidak memenuhi kondisi

	A	B	C	N	P	Q	X
1							
2			ACCURATE (GL)				
3							
4	No.	Biz	Customer	Amount (IDR)	VAT(IDR)	Awb / BL No.	Invoice No.
27	32	Sea Import		3.265.750	359.232		0036
28	35	Sea Import	PT CL	23.391.750	2.573.092	PTCTGR258	0037
29	34	Sea Import		3.565.750	392.232		0038
30	30	Sea Import		10.813.000	1.189.430		0039
31	28	Sea Import		4.619.050	508.095		0040
32	27	Sea Import		19.537.750	2.149.152		0042
33	29	Sea Import		300.000	33.000		0043
34	26	Sea Import		4.619.050	508.095		0044

Y	Z	AA	AB	AC	AD
	Ref	No. inv	DPP	PPN	
	0	0	-	-	
	99	99	-	-	
	0	0	-	-	
	0	0	-	-	
	0	0	-	-	
	0	0	-	-	
	0	0	-	-	
	0	0	-	-	

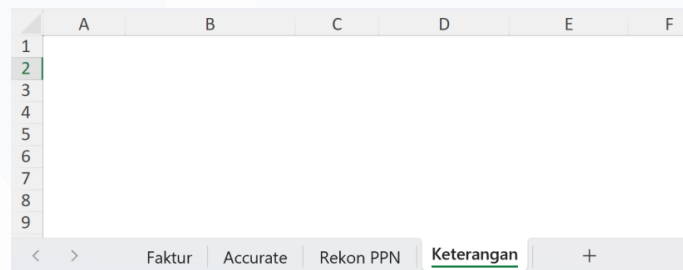
AE	AF	AN	AP	AV	AW
FAKTUR					
NPWP Pembeli / Identit Nama Pembeli	Harga Jual/Penggar	PPN	Ref	No. Invoice	
	3.265.750	359.232			0036
0160000000000000	PT CL	23.391.750	2.573.092	PTCTGCR258	003
		3.565.750	392.232		0038
		10.813.000	1.189.430		0039
		4.619.050	508.095		0040
		19.537.750	2.149.152		0042
		300.000	33.000		0043
		4.619.050	508.095		0044

Gambar 3.70 Rekon PPN

Berdasarkan Gambar 3.70, pada *cell* Excel nomor 35 dengan nama *customer* PT CL, terdapat perolehan nilai yang tidak memenuhi kondisi, yang menunjukkan angka 99 (selisih nilai) untuk kolom referensi dan nomor *invoice*. Berikut penjelasan untuk kolom referensi, nomor *invoice*, DPP, dan PPN:

- Referensi: Menggunakan rumus Excel IF(Q28=AV28;0;99). Dalam kondisi ini, nilai pada kolom Q28 (PTCTGR311) tidak sama dengan AV28 (PTCTGR301), sehingga rumus tersebut menghasilkan nilai 99 yang menunjukkan tidak memenuhi kondisi. Oleh karena itu, kolom referensi pada *cell* Excel nomor 35 dengan nama *customer* PT CL perlu di-copy untuk dipindahkan ke *sheets* baru (keterangan) untuk ditanya lebih lanjut ke klien, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.86.
- No. *Invoice*: Menggunakan rumus Excel IF(X28=AW28;0;99). Dalam kondisi ini, nilai pada kolom X28 (0037) tidak sama dengan AW28 (003), sehingga rumus tersebut menghasilkan nilai 99 yang menunjukkan tidak memenuhi kondisi. Oleh karena itu, kolom referensi pada *cell* Excel nomor 35 dengan nama *customer* PT CL perlu di-copy untuk dipindahkan ke *sheets* baru (keterangan) untuk ditanya lebih lanjut ke klien, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.86.

- c. DPP: Menggunakan rumus Excel “=N28-AN28”, yaitu selisih antara nilai pada kolom N15 dan AN15. Dikarenakan keduanya bernilai Rp23.391.750, maka hasil DPP untuk PT CL adalah 0.
 - d. PPN: Menggunakan rumus Excel “=P28-AW28”, yaitu selisih antara nilai pada kolom P28 dan AW28. Dikarenakan keduanya bernilai Rp2.573.092, maka hasil DPP untuk PT CL adalah 0.
10. Menyiapkan *sheets* kosong dengan nama “keterangan” untuk mencatat nilai yang tidak memenuhi kondisi atau tidak sama antara kedua tabel *general ledger* dan faktur.



Gambar 3. 71 *Sheets* Kosong Keterangan

Berdasarkan Gambar 3.71, *sheets* “keterangan” akan menjadi tempat bagi klien untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi atas temuan perbedaan selama proses rekonsiliasi.

- 11. Membuat tabel kesimpulan untuk mencatat nilai yang tidak memenuhi kondisi atau tidak sama antara tabel *general ledger* dan faktur.

B	C	D	E	G
Selisih No. Invoice				
Nama	No. Invoice	Penjualan	Pajak	Keterangan
PT CL	0037	23.391.750	2.573.092	Terdapat perbedaan No. invoice di Accurate (0037) dan di Faktur (003)
Perbedaan No. Referensi				
Nama	No. Invoice	Penjualan	Pajak	Keterangan
PT CL	0037	23.391.750	2.573.092	Terdapat perbedaan No. referensi di Accurate PTCTGR258 dan di Faktur PTCTGCR258

Gambar 3. 72 Sheets Keterangan

Berdasarkan Gambar 3.72, pada *sheets* keterangan terdapat 2 tabel, yaitu tabel selisih nomor *invoice* dan perbedaan nomor referensi. Kedua tabel tersebut memuat informasi yang sama atas nama *customer* PT CL, dengan nomor *invoice* 0037, nilai penjualan sebesar Rp23.391.750, dan nilai pajak atau PPN sebesar Rp2.573.092. Pada tabel selisih nomor *invoice*, terdapat keterangan perbedaan nomor invoice di Accurate (0037) dan di faktur (003), sementara tabel perbedaan nomor referensi mencatat selisih antara referensi di Accurate (PTCTGR258) dan di faktur (PTCTGCR258). *Sheets* keterangan ini yang nantinya akan menjadi dasar untuk meminta konfirmasi dan koreksi bukti pendukung dari klien.

12. Lakukan cara yang sama apabila terdapat kondisi yang tidak memenuhi dan perlu konfirmasi ke klien. Setelah pekerjaan selesai, dokumen akan diberikan kepada mentor untuk di-review terlebih dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 12.

B. Rekonsiliasi PPh 21

Membuat rekonsiliasi PPh 21 merupakan proses pencocokan data antara pencatatan yang telah dibuat oleh perusahaan dengan bukti potong yang telah dilaporkan. Tujuan membuat rekonsiliasi PPh 21 adalah untuk memastikan seluruh pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21 telah dilakukan secara akurat dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selain itu, tujuan membuat rekonsiliasi PPh 21 juga untuk

menemukan perbedaan antara data yang dicatat oleh perusahaan dengan bukti potong yang diperoleh dari Coretax. Rekonsiliasi PPh 21 disusun menggunakan data dari *general ledger*, yang difilter berdasarkan nama akun yang sesuai dengan akun pada SPT dan akun biaya. Dokumen yang diperlukan untuk membuat rekonsiliasi PPh 21 adalah rekapitulasi bukti potong PPh 21 yang diperoleh dari Coretax dan *general ledger* yang didapat dari mentor. Kegiatan membuat rekonsiliasi PPh 21 dilakukan dari bulan Januari-Desember 2024. Berikut tahapan dalam membuat rekonsiliasi PPh 21 dengan contoh pemotongan dilakukan di bulan Mei 2024:

a. Menerima rekapitulasi bukti potong PPh 21

NO BUKTI POTONG	TANGGAL BUK	NPWP PEMOTONG	NAMA PEMOTONG	IDENTITAS PENERIMA
31000000000000	16/05/2024	60000000000000	PT C	4000000000000000
	02/05/2024		KHATULISTIWA CIPTA AGE	
	13/05/2024		KHATULISTIWA CIPTA AGE	
	14/05/2024		KHATULISTIWA CIPTA AGE	
	21/06/2024		KHATULISTIWA CIPTA AGE	

NAMA_PENERIMA	PENGHASILAN_BRUT	PPH_DIPOTONG	KODE	PASAL	STATUS
Bapak A	18.750.000,00	468.750,00	21-100-09	PPH21	Normal
	775.000,00	19.375,00	21-100-09	PPH21	Normal
	1.030.000,00	25.750,00	21-100-09	PPH21	Normal
	1.400.000,00	35.000,00	21-100-07	PPH21	Normal
TOTAL	20.555.000,00	513.875,00			
	21.750.000,00	543.750,00	21-100-09	PPH21	Normal
TOTAL	21.750.000,00	543.750,00			

Gambar 3. 73 Rekapitulasi Bukti Potong PPh 21

Berdasarkan Gambar 3.73, diketahui rekapitulasi bukti potong PPh 21 mempunyai *template* kolom yang berisi nomor bukti potong, tanggal bukti potong, NPWP pemotong, nama pemotong, identitas penerima, nama penerima, penghasilan bruto, PPh dipotong, kode objek pajak, pasal, dan status pajak. Sebagai contoh, pada bukti potong di bulan Mei 2024, terdapat nomor bukti potong 31000000000000 di tanggal 16 Mei 2024. Nama pemotong pajak adalah PT C dengan nomor NPWP 60000000000000. Penerima penghasilan pajak adalah Bapak A yang memiliki identitas NPWP 4000000000000000. Penghasilan bruto yang diterima Bapak A sebesar Rp18.750.000, dengan PPh yang dipotong senilai Rp468.750. Transaksi ini

2. *Copy* seluruh *sheets* rekapitulasi bukti potong PPh 21 dan judul kolom *general ledger*, lalu pindahkan ke dalam *sheets* “Rekon Bupot PPh 21”, sehingga tampilan akan berbentuk sebagai berikut:

SPT				
NO_BUKTI_POTONG	TANGGAL_BUKTI	NPWP_PEMOTONG	NAMA_PEMOTONG	IDENTITAS_PENERIMA
31000000000000	16/05/2024	60000000000000	PT C	4000000000000000
	02/05/2024		KHATULISTIWA CIPTA AGE	
	13/05/2024		KHATULISTIWA CIPTA AGE	
	14/05/2024		KHATULISTIWA CIPTA AGE	
	21/06/2024		KHATULISTIWA CIPTA AGE	

NAMA_PENERIMA	PENGHASILAN_BRUT	PPH_DIPOTONG	KODE	PASAL	STATU
Bapak A	18.750.000,00	468.750,00	21-100-09	PPH21	Normal
	775.000,00	19.375,00	21-100-09	PPH21	Normal
	1.030.000,00	25.750,00	21-100-09	PPH21	Normal
	1.400.000,00	35.000,00	21-100-07	PPH21	Normal
TOTAL	20.555.000,00	513.875,00			
	21.750.000,00	543.750,00	21-100-09	PPH21	Normal
TOTAL	21.750.000,00	543.750,00			

No.	Acc Cd	Account Name	Voucher Da	Voucher No.	Customer	Dr Amt Idr	Cr Amt Idr	Bl Lc Amt	Remark

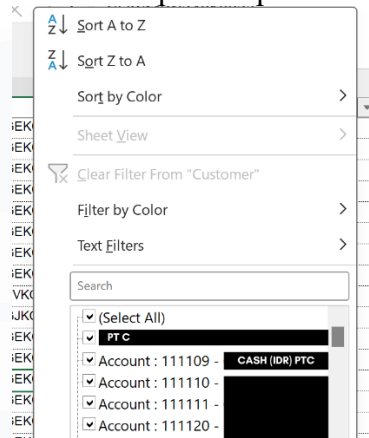
Gambar 3. 76 Sheets Rekon Bupot PPh 21

3. Pada *sheets general ledger*, gunakan fitur filter pada kolom *customer* untuk mencari nama Bapak A sesuai dengan transaksi bulan Mei di rekapitulasi bukti potong PPh 21.

Voucher Dat	Voucher No.	Customer	Curr
31-Dec-2023	Prev	Previous Balance	IDR
04-Jan-2024	PTCGLI01	MIKA	IDR
09-Jan-2024			IDR
12-Jan-2024			IDR
13-Jan-2024			IDR
13-Jan-2024			IDR
13-Jan-2024			IDR
15-Jan-2024			IDR
17-Jan-2024			IDR

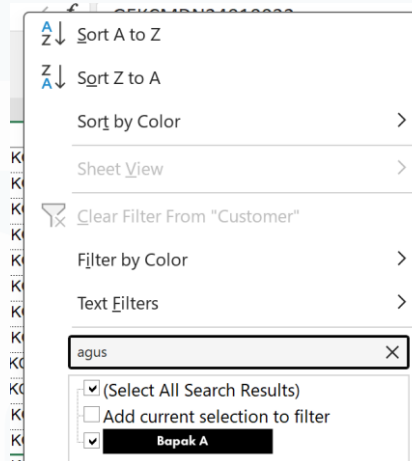
Gambar 3. 77 Sheets General Ledger

4. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut:



Gambar 3. 78 Filter Customer

5. Ketik nama Bapak A di kolom *search*, lalu klik *enter* pada keyboard.



Gambar 3. 79 Filter Customer

6. Setelah itu, akan muncul tampilan sebagai berikut:

A	B	C	D	E
No.	Acc Cd	Account Name	Voucher Dat	Voucher No.
725	111214	Bank CIMB Niaga	22-Jan-2024	PTCAG001
726	111214	Bank CIMB Niaga	22-Jan-2024	
792	111214	Bank CIMB Niaga	16-Feb-2024	
793	111214	Bank CIMB Niaga	16-Feb-2024	
882	111214	Bank CIMB Niaga	19-Mar-2024	

F	I	L	N	V
Customer	Dr Amt Idr	Cr Amt Idr	BI Lc Amt	Remark
Bapak A		2.900,00	1.083.018.282,41	
		8.482.500,00	1.074.535.782,41	
		2.900,00	1.122.205.710,76	
		7.166.250,00	1.115.039.460,76	
		2.900,00	1.208.234.168,15	

Gambar 3. 80 Sheets General Ledger

7. Lanjutkan cara yang sama untuk memfilter kolom *account name* dengan nama akun *defrayment* dan *voucher date* dengan memilih bulan April. Lalu, *copy* untuk dipindahkan ke *sheets* rekon bupot PPh 21, sehingga tampilan *general ledger* akan menampilkan sebagai berikut:

A	B	C	D	E
No.	Acc Cd	Account Name	Voucher Dat	Voucher No.
12.107	533016	Defrayment	30-Apr-2024	PTCAG2001
12.108	533016	Defrayment	30-Apr-2024	PTCAG2001
12.109	533016	Defrayment	30-Apr-2024	
12.110	533016	Defrayment	30-Apr-2024	
12.111	533016	Defrayment	30-Apr-2024	
12.112	533016	Defrayment	30-Apr-2024	

F	I	L	N	V
Customer	Dr Amt Idr	Cr Amt	BI Lc Amt	Remark
Bapak A	1.350.000,00		3.155.000,00	
	450.000,00		3.605.000,00	
	2.700.000,00		6.305.000,00	
Bapak A	5.250.000,00		11.555.000,00	
	5.850.000,00		17.405.000,00	
	3.150.000,00		20.555.000,00	
AGUS WIJAYA	2.250.000,00		25.362.500,00	WAN HAI 329 V.N030

Gambar 3. 81 Sheets General Ledger

8. *Paste* data yang telah di-*copy* dari *general ledger*, sehingga *sheets* rekon bupot PPh 21 di tanggal 16 Mei 2024 akan menampilkan tampilan sebagai berikut:

SPT				
NO_BUKTI_POTONG	TANGGAL_E	NPWP_PEMOTONG	NAMA_PEMOTONG	IDENTITAS_PENERIMA
31000000000000	16/05/2024	60000000000000	PT C	4000000000000000

NAMA_PENERIMA	PENGHASILAN_BRUTO	PPH_DIPOTONG	KODE	PASAL	STATU
Bapak A	18.750.000,00	468.750,00	21-100-09	PPH21	Normal

ACCURATE

No.	Acc C	Account Nam	Voucher D	Voucher No.	Customer
12.107	533016	Defrayment	30-Apr-2024	PTCAG2001	Bapak A
12.108	533016	Defrayment	30-Apr-2024	PTCAG2001	Bapak A
12.109	533016	Defrayment	30-Apr-2024		
12.110	533016	Defrayment	30-Apr-2024		
12.111	533016	Defrayment	30-Apr-2024		
12.112	533016	Defrayment	30-Apr-2024		

Dr Amt Idr	Cr Amt I	Bl Lc Amt	Remark
1.350.000,00		3.155.000,00	
450.000,00		3.605.000,00	
2.700.000,00		6.305.000,00	
5.250.000,00		11.555.000,00	
5.850.000,00		17.405.000,00	
3.150.000,00		20.555.000,00	

Gambar 3. 82 Sheets Rekon Bupot PPh 21

Berdasarkan Gambar 3.82, pada tanggal 16 Mei 2024 di tabel SPT, terdapat transaksi PPh 21 atas nama Bapak A dengan penghasilan bruto sebesar Rp18.750.000 dan PPh yang dipotong senilai Rp468.750. Jika dibandingkan dengan tabel Accurate di tanggal yang sama, terdapat nilai penghasilan bruto dengan nilai yang sama walaupun pencatatannya dilakukan secara berangsur, yaitu sebesar Rp1.350.000, Rp450.000, Rp2.700.000, Rp5.250.000, Rp5.850.000, Rp3.150.000. Berdasarkan hal tersebut, data di tabel SPT dan Accurate telah sesuai dan tidak terdapat selisih untuk diminta konfirmasi dari klien.

9. Lakukan cara yang sama untuk bulan Mei dan bulan-bulan lainnya, sehingga tampilan rekonsiliasi untuk bulan Mei akan menampilkan tampilan sebagai berikut:

SPT

NO_BUKTI_POTONG	TANGGAL	NPWP_PEMOTONG	NAMA_PEMOTONG	IDENTITAS_PENERIMA
31000000000000	16/05/2024	600000000000000	PT C	4000000000000000
35000000000000	02/05/2024	600000000000000	PT C	4200000000000000
	13/05/2024			
	14/05/2024			

NAMA_PENERIMA	PENGHASILAN_BRUTO	PPH_DIPOTONG	KODE	PASAL	STATU
Bapak A	18.750.000,00	468.750,00	21-100-09	PPH21	Normal
Bapak I	775.000,00	19.375,00	21-100-09	PPH21	Normal
	1.030.000,00	25.750,00	21-100-09	PPH21	Normal
	1.400.000,00	35.000,00	21-100-07	PPH21	Normal
TOTAL	20.555.000,00	513.875,00			

ACCURATE

No.	Acc C	Account Nam	Voucher D	Voucher No.	Customer
12.107	533016	Defrayment	30-Apr-2024	PTCAG2001	Bapak A
12.108	533016	Defrayment	30-Apr-2024	PTCAG2001	Bapak A
12.109	533016	Defrayment	30-Apr-2024		
12.110	533016	Defrayment	30-Apr-2024		
12.111	533016	Defrayment	30-Apr-2024		
12.112	533016	Defrayment	30-Apr-2024		
12.104	533016	Defrayment	25-Apr-2024		

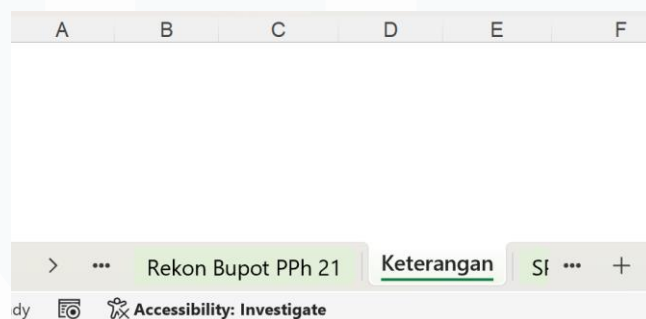
Dr Amt Idr	Cr Amt I	Bl Lc Amt	Remark
1.350.000,00		3.155.000,00	
450.000,00		3.605.000,00	
2.700.000,00		6.305.000,00	
5.250.000,00		11.555.000,00	
5.850.000,00		17.405.000,00	
3.150.000,00		20.555.000,00	
1.030.000,00		1.030.000,00	
18.430.000,00			

Gambar 3. 83 Sheets Rekon Bupot PPh 21

Berdasarkan Gambar 3.83, rekonsiliasi PPh 21 di bulan Mei tidak menghasilkan jumlah penghasilan bruto yang sama antara data di tabel SPT dan di Accurate. Hal tersebut terjadi karena pada transaksi di

tanggal 02 Mei 2024 atas nama Bapak I tidak terdapat di *general ledger*. Maka dari itu, transaksi tanggal 02 Mei 2024 atas nama Bapak I yang mempunyai jumlah penghasilan bruto sebesar Rp775.000 dan PPh yang dipotong senilai Rp19.375, perlu di-copy ke dalam *sheets* “keterangan” untuk meminta konfirmasi dari klien.

10. Buat *sheets* baru dengan nama “keterangan” untuk mencatat transaksi yang tidak terdapat di *general ledger*.



Gambar 3. 84 Sheets Keterangan

11. Selanjutnya, buat tabel kesimpulan untuk mencatat nilai yang tidak terdapat di *general ledger*, sehingga tampilan akan berbentuk sebagai berikut:

HASIL REKON PPh 21 2024

	SPT	GL	Selisih	Keterangan		
				Masa Pajak	Nama Pembeli	Keterangan
Biaya	775.000,00		==>	PPh 21 Mei 2024	Bapak I	Tidak tercatat di GL
	8.602.500,00			PPh 21 Des 2024	AGUS WIJAYA	Tidak tercatat di GL

Gambar 3. 85 Sheets Keterangan

Berdasarkan Gambar 3.85, pada *sheets* keterangan, terdapat transaksi yang perlu dikonfirmasi ke klien atas tidak tercatatnya PPh 21 di Accurate, meskipun pelaporan PPh 21 telah dilakukan. *Sheets* keterangan memuat informasi berupa kolom SPT yang mencantumkan jumlah penghasilan bruto klien, GL (*general ledger*), selisih, masa pajak, nama pembeli, dan keterangan. Berdasarkan tabel hasil rekon PPh 21 2024, terdapat akun biaya yang perlu konfirmasi, dengan nilai SPT atau penghasilan bruto

sebesar Rp775.000 untuk masa pajak PPh 21 bulan Mei 2024, atas nama pembeli Bapak I, dengan keterangan “tidak tercatat di GL”. Nantinya, *sheets* keterangan akan menjadi dasar untuk meminta konfirmasi dari klien.

12. Lakukan cara yang sama apabila terdapat transaksi yang tidak terdapat di *general ledger* dan perlu konfirmasi ke klien. Setelah pekerjaan selesai, dokumen akan diberikan kepada mentor untuk di-*review* terlebih dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13.

C. Rekonsiliasi PPh 23

Membuat rekonsiliasi PPh 23 merupakan kegiatan penyesuaian data yang telah dicatat oleh perusahaan dengan bukti potong yang telah dilaporkan dalam SPT. Tujuan membuat rekonsiliasi PPh 23 adalah untuk memastikan keakuratan pelaporan pajak, serta menghindari kesalahan atau selisih dalam pelaporan pajak yang dapat menimbulkan sanksi dan pemeriksaan pajak. Rekonsiliasi PPh 23 dilakukan dengan mencari nama *customer* di *general ledger* untuk dicocokkan dengan akun biaya, utang, penghasilan bruto, dan nilai PPh yang dipotong sama nilainya dengan bukti potong PPh 23. Oleh karena itu, pada saat pelaksanaan magang pengerjaan rekonsiliasi PPh 23 dilakukan dengan menemukan perbedaan antara rekapitulasi *general ledger* dan rekapitulasi bukti potong PPh 23. Dokumen yang diperlukan untuk membuat rekonsiliasi PPh 23 adalah rekapitulasi *general ledger* dan rekapitulasi PPh 23 yang di-*impor* dari Coretax, yang diperoleh dari mentor. Kegiatan membuat rekonsiliasi PPh 23 dilakukan dari bulan Januari-Desember 2024. Berikut tahapan dalam membuat rekonsiliasi PPh 23 dengan contoh di bulan April 2024:

a. Menerima rekapitulasi *general ledger*

No.	Acc Cd	Account Name	Voucher Dat	Voucher No.
11.379	511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea	06-Apr-2024	PTL04242025
11.380	511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea	06-Apr-2024	
11.381	511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea	16-Apr-2024	
11.382	511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea	30-Apr-2024	
11.383	511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea	30-Apr-2024	
11.384	511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea	30-Apr-2024	
11.385	511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea	30-Apr-2024	
Customer	Dr Amt Idr	Cr Amt Idr	BI Lc Amt	Remark
PT L	54.500,00		347.342.025,00	ASURANSI(NON
	123.000,00		347.465.025,00	
	2.025.000,00		349.490.025,00	
	2.062.500,00		351.552.525,00	
	682.500,00		352.235.025,00	
	5.304.705,00		357.539.730,00	
PT L	300.000,00		357.839.730,00	

Gambar 3. 86Rekapitulasi *General Ledger*

Berdasarkan Gambar 3.86, diketahui terdapat *general ledger* dengan *template* kolom yang berisi nomor, *acc cd* (*account cash disbursement*), *account name*, *voucher date*, *voucher no*, *customer*, *curr* atau *currency*, *dr amt* Idr (*debit amount in IDR*), *cr amt* IDR (*credit amount in IDR*), BI Lc Amt (*Bank Indonesia letter of credit amount*), dan *remark* atau catatan.

b. Menerima rekapitulasi bukti potong Pph 23

NO_BUKTI_POT	TANGGAL	BINAMA_PENERIMA_PENGHASILAN	BRUTO	PPH_DIPOTONG	KODE_OBJEK	PASAL	STATUS
25000000000000	29/04/2024	PT L	300.000,00	6.000,00	24-104-42	PPH23	Normal
	29/04/2024		315.000,00	6.300,00	24-104-42	PPH23	Normal
	29/04/2024		315.000,00	6.300,00	24-104-42	PPH23	Normal
	25/04/2024		2.235.850,00	44.717,00	24-104-30	PPH23	Normal
	18/04/2024		4.500.000,00	90.000,00	24-104-40	PPH23	Normal
	17/04/2024		10.462.700,00	209.254,00	24-104-40	PPH23	Normal
	17/04/2024		1.596.000,00	31.920,00	24-104-42	PPH23	Normal
	17/04/2024		4.500.000,00	90.000,00	24-104-40	PPH23	Normal
	17/04/2024		250.000,00	5.000,00	24-104-42	PPH23	Normal
	04/04/2024		5.000.000,00	100.000,00	24-104-03	PPH23	Normal
	04/04/2024		1.950.000,00	39.000,00	24-104-24	PPH23	Normal
	04/04/2024		2.750.000,00	55.000,00	24-104-24	PPH23	Normal
	04/04/2024		652.000,00	13.040,00	24-104-42	PPH23	Normal
	04/04/2024		450.000,00	9.000,00	24-104-42	PPH23	Normal

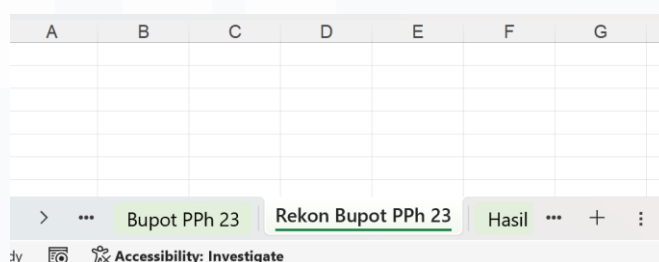
Gambar 3. 87 Rekapitulasi Bukti Potong PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.87, terdapat rekapitulasi PPh 23 dengan contoh di bulan April 2024. Pada bulan April 2024, PT C melakukan sebanyak 13 jenis transaksi jasa yang berbeda. Rekapitulasi bukti potong PPh 23 memiliki informasi seperti nomor bukti potong, tanggal, nama penerima penghasilan, bruto, PPh dipotong, kode objek pajak, pasal, dan status pajak. Sebagai contoh, pada transaksi di bulan April 2024, terdapat nomor bukti

potong 2500000000000 di tanggal 29 April 2024. Nama penerima penghasilan atas transaksi jasa yaitu PT L, dengan nilai bruto sebesar Rp300.000, dan PPh yang dipotong senilai Rp6.000 ($Rp300.000 \times 2\%$). Transaksi ini menggunakan kode objek pajak 24-104-42, pasal yang dikenakan yaitu PPh 23, dan berstatus normal.

c. Membuat rekonsiliasi PPh 23

1. Siapkan *sheets* baru dengan diberi nama “Rekon Bupot PPh 23”.



Gambar 3. 88 *Sheets* Kosong

2. *Copy* seluruh *sheets* rekapitulasi bukti potong PPh 23 dan judul kolom dari *general ledger*, lalu pindahkan ke dalam *sheets* “Rekon Bupot PPh 23”. Untuk bagian yang diambil dari *general ledger*, *copy* judul *template* menjadi tiga bagian untuk biaya, hutang PPh 23 kredit, dan hutang PPh 23 debit, sehingga tampilan *sheets* “Rekon Bupot PPh 23” akan berbentuk sebagai berikut:

BUPOT PPH 23							
NO_BUKTI_POT	TANGGAL_B	NAMA_PENERIMA_PENGHASILAN	BRUTO	PPH_DIPOTONG	KODE_OBJEK	PASAL	STATUS
2500000000000	29/04/2024	PT L	300.000,00	6.000,00	24-104-42	PPH23	Normal
	29/04/2024		315.000,00	6.300,00	24-104-42	PPH23	Normal
	29/04/2024		315.000,00	6.300,00	24-104-42	PPH23	Normal
	25/04/2024		2.235.850,00	44.717,00	24-104-30	PPH23	Normal
	18/04/2024		4.500.000,00	90.000,00	24-104-40	PPH23	Normal
	17/04/2024		10.462.700,00	209.254,00	24-104-40	PPH23	Normal
	17/04/2024		1.596.000,00	31.920,00	24-104-42	PPH23	Normal
	17/04/2024		4.500.000,00	90.000,00	24-104-40	PPH23	Normal
	17/04/2024		250.000,00	5.000,00	24-104-42	PPH23	Normal
	04/04/2024		5.000.000,00	100.000,00	24-104-03	PPH23	Normal
	04/04/2024		1.950.000,00	39.000,00	24-104-24	PPH23	Normal
	04/04/2024		2.750.000,00	55.000,00	24-104-24	PPH23	Normal
	04/04/2024		652.000,00	13.040,00	24-104-42	PPH23	Normal
	04/04/2024		450.000,00	9.000,00	24-104-42	PPH23	Normal

GL - BIAYA							
Acc Cd	Account Name	Voucher Date	Voucher No.	Customer	Dr Amt Idr	Dr Lc Amt	Remark

GL - HUTANG PPH 23 (CREDIT)

Acc Cd	Account Name	Voucher Date	Voucher No.	Customer	Cr Amt Idr	Remark

GL - HUTANG PPH 23 (DEBIT)

Acc Cd	Account Name	Voucher Date	Voucher No.	Customer	Dr Amt Idr	Remark

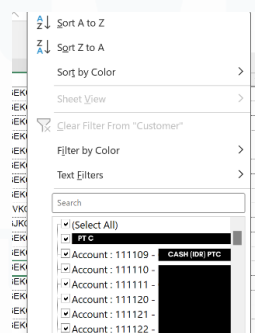
Gambar 3. 89 Sheets Rekon Bupot PPh 23

3. Pada *sheets general ledger*, gunakan filter pada kolom *customer* untuk mencari nama PT L sesuai dengan transaksi bulan April di rekapitulasi bukti potong PPh 23.

Voucher Dat	Voucher No.	Customer	Curr
31-Dec-2023	Prev	Previous Balance	IDR
04-Jan-2024	PTCOLI01	MIKA	IDR
09-Jan-2024			IDR
12-Jan-2024			IDR
13-Jan-2024			IDR
13-Jan-2024			IDR
13-Jan-2024			IDR

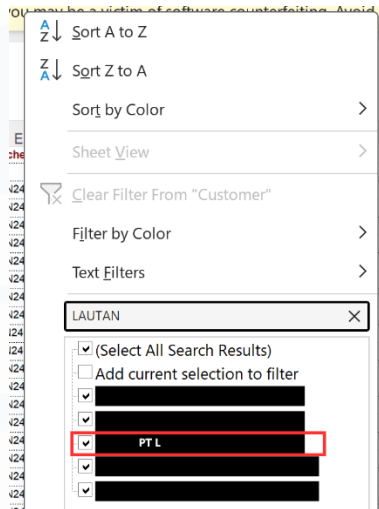
Gambar 3. 90 Sheets General Ledger

4. Setelah itu, akan muncul tampilan seperti berikut:



Gambar 3. 91 Filter Customer

5. Ketik nama PT L di kolom *search*, lalu klik *enter* pada *keyboard*.



Gambar 3. 92 Filter Customer

6. Setelah itu, akan muncul tampilan sebagai berikut:

A	B	C	D	E	F
No.	Acc Cd	Account Name	Voucher Dat	Voucher No.	Customer
701	111214	Bank CIMB Niaga (IDR)	11-Jan-2024	PTCLAG2015	PT L
703	111214	Bank CIMB Niaga (IDR)	15-Jan-2024		
719	111214	Bank CIMB Niaga (IDR)	16-Jan-2024		
804	111214	Bank CIMB Niaga (IDR)	23-Feb-2024		
868	111214	Bank CIMB Niaga (IDR)	14-Mar-2024		
941	111214	Bank CIMB Niaga (IDR)	16-Apr-2024		

I	L	N	V
Dr Amt Idr	Cr Amt Idr	BI Lc Amt	Remark
10.748.735,00		1.180.173.338,41	
72.944.444,00		1.266.872.862,41	
	4.459.500,00	1.122.954.082,41	
34.542.820,00		1.139.333.047,76	
31.191.201,00		1.258.208.361,15	
	4.459.500,00	1.043.220.514,57	

Gambar 3. 93 Filter Customer

7. Lanjutkan cara yang sama untuk memfilter kolom *account name* dengan nama akun yang berhubungan dengan “*cost*” untuk bagian biaya atau “*PPh 23 payable*” untuk bagian hutang kredit atau debit.

A	B	C	D	E	F
No.	Acc Cd	Account Name	Voucher Dat	Voucher No.	Customer
11.574	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	15-Apr-2024		
11.575	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	15-Apr-2024		
11.578	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	24-Apr-2024	PTL04242025	PT L
11.749	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	30-Oct-2024		
11.774	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	01-Nov-2024		
11.775	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	01-Nov-2024		
11.785	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	14-Nov-2024		
11.826	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	12-Dec-2024		
11.861	511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea	31-Dec-2024		

I	L	N	V
Dr Amt Idr	Cr Amt	BI Lc Amt	Remark
4.500.000,00		5.143.527.277,22	
4.500.000,00		5.148.027.277,22	
300.000,00		5.157.083.694,52	
4.500.000,00		16.963.229.184,32	
4.500.000,00		17.678.347.084,32	
4.500.000,00		17.682.847.084,32	
7.750.000,00		17.742.495.134,32	
1.304.000,00		18.487.428.729,32	
815.000,00		18.982.019.069,48	

Gambar 3. 94 Filter Account Name

Berdasarkan Gambar 3.94, setelah dilakukan filter *account name* dengan nama akun “cost”, terlihat PT L mempunyai transaksi jasa yang pencatatannya dilakukan tanggal 24 April 2024, dengan nomor voucher PTL04242025, dan jumlah bruto sebesar Rp300.000. Baris ini yang nantinya akan di-copy dan dipindahkan ke *sheets* rekon bupot PPh 23.

8. *Paste* baris yang telah di post pada *sheets general ledger*, sehingga tampilan pada *sheets* “Rekon Bupot PPh 23” untuk bagian “Bupot” dan “Biaya” akan menampilkan tampilan sebagai berikut:

BUPOT PPH 23							
NO. BUKTI	POT	TANGGAL	BI. NAMA	PENERIMA	PENGHASILAN	BRUTO	PPH DIPOTONG
15000000000000		29/04/2024		PT L		300.000,00	6.000,00
		29/04/2024				315.000,00	6.300,00
		29/04/2024				315.000,00	6.300,00
		25/04/2024				2.235.850,00	44.717,00
		18/04/2024				4.500.000,00	90.000,00
		17/04/2024				10.462.700,00	209.254,00
		17/04/2024				1.596.000,00	31.920,00
		17/04/2024				4.500.000,00	90.000,00
		17/04/2024				250.000,00	5.000,00
		04/04/2024				5.000.000,00	100.000,00
		04/04/2024				1.950.000,00	39.000,00
		04/04/2024				2.750.000,00	55.000,00
		04/04/2024				652.000,00	13.040,00
		04/04/2024				450.000,00	9.000,00

GL - BIAYA						
Acc Cd	Account Name	Voucher Date	Voucher No.	Customer	Dr Amt Idr	Remark
511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea Ex	24-Apr-2024	PTL04242025	PT L	300.000,00	
511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea Ex	15-Apr-2024			4.500.000,00	
511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea Im	01-Apr-2024			10.462.700,00	
511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea Im	01-Apr-2024			1.596.000,00	
511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea Ex	15-Apr-2024			4.500.000,00	

Gambar 3. 95 Sheets Rekon Bupot PPh 23

9. Lakukan cara yang sama untuk mencari akun “PPh 23 payable” di *sheets general ledger* terkait dengan transaksi yang sama, sehingga tampilannya akan terlihat sebagai berikut:

GL - HUTANG PPH 23 (CREDIT)

No.	Acc Cd	Account Name	Voucher Date	Voucher No.	Customer	Cr Amt Idr	Remark
10.009	223314	PPh 23 Payable	26-Apr-2024	PTL04242025	PT L	6.000,00	
10.007	223314	PPh 23 Payable	26-Apr-2024			6.300,00	
10.008	223314	PPh 23 Payable	26-Apr-2024			6.300,00	
10.006	223314	PPh 23 Payable	24-Apr-2024			44.717,00	
10.003	223314	PPh 23 Payable	16-Apr-2024			90.000,00	
9.986	223314	PPh 23 Payable	04-Apr-2024			209.254,00	

GL - HUTANG PPH 23 (DEBIT)

No.	Acc Cd	Account Name	Voucher Date	Voucher No.	Customer	Dr Amt Idr	Remark
10.021	223314	PPh 23 Payable	09-May-2024	PTL04242025	PT L	6.000,00	
10.017	223314	PPh 23 Payable	09-May-2024			6.300,00	
10.018	223314	PPh 23 Payable	09-May-2024			6.300,00	
10.027	223314	PPh 23 Payable	09-May-2024			44.717,00	
10.022	223314	PPh 23 Payable	09-May-2024			90.000,00	
10.024	223314	PPh 23 Payable	09-May-2024			209.254,00	

Gambar 3. 96 *Sheets Rekon Bupot PPh 23*

Berdasarkan Gambar 3.96, terdapat dua transaksi terkait akun PPh 23 payable, yaitu yang berada di sisi debit dan kredit. Akun PPh 23 payable yang berada pada sisi kredit dicatat saat perusahaan melakukan pembayaran atas jasa, sedangkan PPh 23 payable yang berada pada sisi debit dicatat saat perusahaan akan menyetorkan PPh 23 ke kas negara.

10. Lakukan cara yang sama untuk mencocokkan data yang ada pada tabel bukti potong dan *general ledger* bagian biaya, hutang PPh 23 debit, serta kredit.
11. Apabila terdapat transaksi yang tidak ditemukan pada *general ledger*, maka perlu dibuat *sheets* baru untuk konfirmasi kepada pihak klien. Kasus tersebut dapat dilihat pada PT LM di transaksi ke dua bukti potong PPh 23.

NO_BUKTI_POT	TANGGAL_BI	NAMA_PENERIMA_PENGHASILAN	BRUTO	PPH_DIPOTONG	KODE_OBJEK_PASAL	STATUS
3500000000000000	28/05/2024	PT L	15.192.200,00	303.844,00	24-104-40 PPH23	Normal
3000000000000000	28/05/2024	PT LM	30.059.400,00	601.188,00	24-104-40 PPH23	Normal
	28/05/2024		15.192.200,00	303.844,00	24-104-40 PPH23	Normal
	21/05/2024		1.000.000,00	20.000,00	24-104-42 PPH23	Normal
	15/05/2024		3.406.205,00	68.124,00	24-104-40 PPH23	Normal
	15/05/2024		300.000,00	6.000,00	24-104-40 PPH23	Normal

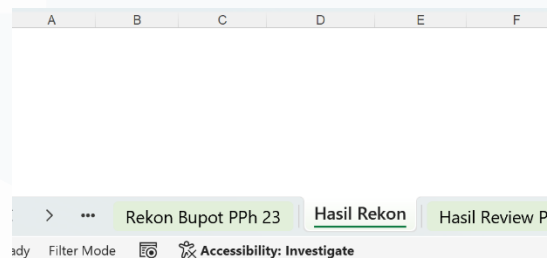
GL - BIAYA

Acc Cd	Account Name	Voucher Date	Voucher No.	Customer	Dr Amt Idr	Remark
511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea Ex	24-Apr-2024	PTL04242025	PT L	300.000,00	
511140	Cost of Sales Vat 0 (Sea Ex	15-Apr-2024			4.500.000,00	
511130	Cost of Sales Vat 0 (Sea Im	01-Apr-2024			10.462.700,00	

Gambar 3. 97 Sheets Rekon Bupot PPh 23

Berdasarkan Gambar 3.97, transaksi kedua bukti potong PPh 23 yang dilakukan oleh PT LM tidak ditemukan nilai biaya di dalam *general ledger*. Maka dari itu, transaksi tersebut perlu di-copy dan dipindahkan ke *sheets* baru untuk meminta konfirmasi ke klien.

12. Membuat sheet baru yang diberi nama “Hasil Rekon”.



Gambar 3. 98 Sheets Hasil Rekon

13. Selanjutnya, buat tabel kesimpulan untuk mencatat nilai yang tidak terdapat di *general ledger*, sehingga tampilan akan berbentuk sebagai berikut:

HASIL REKON PPH 23 2024									
GL	SPT	Selisih	No. Bupot	Keterangan		Masa Pajak	Bruto	Sum	
			5000000000000	PT LM		04	315.000		
						04	315.000		
						04	250.000		
						04	2.235.850		
						04	2.590.000		

Gambar 3. 99 Sheets Hasil Rekon

Berdasarkan Gambar 3.99, pada *sheets* hasil rekon, terdapat transaksi yang perlu dikonfirmasi ke klien karena biaya atas jasa tersebut tidak tercatat di Accurate. Paste transaksi PT LM yang telah di-copy ke dalam tabel hasil rekon. Transaksi tersebut mempunyai informasi dengan

nomor bukti potong 50000000000, nama penerima penghasilan PT F, masa pajak di bulan April, dan nilai bruto sebesar Rp315.000.

14. Lakukan cara yang sama apabila terdapat transaksi yang tidak terdapat di *general ledger* dan perlu konfirmasi ke klien. Setelah pekerjaan selesai, dokumen akan diberikan kepada mentor untuk di *review* terlebih dahulu. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 14.

7. PT S

A. Rekapitulasi PPh 21

Rekapitulasi PPh 21 merupakan proses pencatatan terkait data pemotongan serta penyetoran Pajak Penghasilan 21 yang dilakukan setiap bulan berdasarkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 yang telah dilaporkan. Tujuan dari membuat rekapitulasi PPh 21 adalah untuk *cross check* akun utang, pajak PPN, pajak keluaran, dan pajak masukan yang dicatat pada *general ledger* (GL), guna memastikan kesesuaian antara laporan pajak dan pencatatan akuntansi. Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21, bukti pembayaran pajak, dan format rekapitulasi PPh 21 yang didapat dari mentor. Kegiatan rekapitulasi PPh 21 dilakukan dari bulan Januari-Desember 2024. Berikut tahapan dalam membuat rekapitulasi PPh 21 dengan contoh di bulan Februari 2024:

a. Menerima lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21

 KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		FORMULIR 1721 02022024	
MASA PAJAK [mm-yyyy] H.01 02 - 2024		H.02 ☒ SPT NORMAL H.03 ☐ SPT PEMBETULAN KE- 0 H.04		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN: (SPP Klien/Petanggung) H.05 H.06	
A. IDENTITAS PEMOTONG					
1. NPWP	: A.01	0500000000000000			
2. NAMA	: A.02	PT S			
3. ALAMAT	: A.03	Jakarta Utara			
4. NO. TELEPON	: A.04	081000000000	5. EMAIL	: A.05	ptesgmail.com

B. OBJEK PAJAK					
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEGAWAI TETAP	21-100-01	32	126.003.504	1.945.378
2	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3	PEGAWAI TIDAK TETAP	21-100-03	0	0	0
4	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR PEMASARAN BERJENJANG	21-100-04	0	0	0
4b.	AGEN ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJAJ BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI LAINNYA	21-100-09	1	500.000	12.500
5	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG MENERIMA IMBALAN SECARA TIDAK TERATUR	21-100-10	0	0	0
6	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN UANG PENSUN	21-100-12	0	0	0
8	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 YANG TIDAK BERESIT FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D 10)		33	126.003.504	1.957.878
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) SETOR					JUMLAH (Rp)
11a	PPh Pasal 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH				0
12	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0
13	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI : MASA PAJAK : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER 2022				0
14	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				0
15	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 11a - ANGKA 14)				1.957.878
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBELTAN DAN/ATAU ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PENGISIAN DARI BAGIAN 9 ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				0
17	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBELTAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)				0
18	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPERSIKAN KE MASA PAJAK (mm-yyyy)				-

NPWP PEMOTONG : 0500000000000000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENERIMA UANG PESANGON YANG BISA DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01	0	0	0
2	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02	0	0	0
3	PEJABAT NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TIMPOLRI DAN PENSUN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBERIKAN KEPADA KEJANGKARAN NEGARA/DAERAH	21-402-01	0	0	0
4	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99	0	0	0
5	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)		0	0	0

D. LAMPIRAN

☒ 1. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Masa Pajak)	2 LEMBAR	☒ 5. FORMULIR 1721 - IV (Untuk Satu Masa Pajak)	1 LEMBAR
☐ 2. FORMULIR 1721 - I (Untuk Satu Tahun Pajak)	0 LEMBAR	☐ 6. FORMULIR 1721 - V (Untuk Satu Tahun Pajak)	0 LEMBAR
☒ 3. FORMULIR 1721 - II (Untuk Satu Tahun Pajak)	2 LEMBAR	☒ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDBAHBUKUAN (Pbk)	1 LEMBAR
☐ 4. FORMULIR 1721 - III (Untuk Satu Tahun Pajak)	0 LEMBAR	☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS	0 LEMBAR

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan dan atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. ☒ E.01 PEMOTONG ☐ E.02 KUASA

2. NPWP : 0721000000000000

3. NAMA : Bapak A

4. TANGGAL : 18-03-2024 (dd-mm-yy)

5. TEMPAT : Jawa Tengah

6. TANDA TANGAN :

Gambar 3. 100 Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh 21 Halaman Induk

Berdasarkan Gambar 3.100, diketahui pada Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Februari 2024, mempunyai informasi sebagai berikut:

- a) Bagian **Identitas Pemotong (A)** memuat rincian NPWP 050000000000000000 atas nama PT S yang beralamat di Jakarta Utara

serta memiliki nomor telepon 081000000000 dan alamat *email* pts@gmail.com.

- b) Bagian **Objek Pajak (B)**, terdapat informasi jenis penerima penghasilan yang menjadi dasar pemotongan PPh 21 oleh PT S. Rincian informasi tersebut terdiri dari dua kategori. Pertama, penghasilan yang diterima oleh **pegawai tetap**, dengan kode objek pajak 21-100-01, memiliki **jumlah penerima penghasilan** sebanyak 5 [1], dengan **jumlah bruto** sebesar Rp125.503.504 [2], dan **jumlah pajak yang dipotong** sebesar Rp1.945.378 [3]. Kedua, penghasilan yang diterima oleh **bukan pegawai lainnya**, dengan kode pajak 21-100-09, memiliki **jumlah penerima penghasilan** sebanyak 1 [4], dengan **jumlah bruto** sebesar Rp500.000 [5], dan **jumlah pajak yang dipotong** sebesar Rp12.500 [6]. Berdasarkan informasi tersebut, terdapat jumlah penerima penghasilan sebanyak 33 orang, dengan jumlah bruto sebesar Rp126.003.504 (Rp125.503.504 + Rp500.000), dan jumlah pajak yang dipotong sebesar Rp1.957.878 (Rp1.945.378 + Rp12.500).
- c) Bagian **Pernyataan dan Tanda Tangan (E)**, terdapat informasi bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) masa Februari 2024, dilaporkan pada tanggal 18 Maret 2024 [7].
- b. Menerima bukti pembayaran pajak

PermataBank Permatae-Business

Permatae-Business BUKTI PENERIMAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN

PENERIMAAN PAJAK

Data Pembayaran

Tanggal dan Jam Bayar : 08/03/2024 13:53:11

Tanggal Buku : 08/03/2024

Kode Cabang Bank : 0101

Data Setoran

Kode Billing : 103500000000

NPWP : 0500000000000000

Nama Wajib Pajak : PT S

Alamat : Jakarta Utara

Keterangan : PPh 21 FEB 2024 Jakarta Utara

Jumlah Setoran : 1.957.878

Terbilang : Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah

Mata Uang : IDR

Jumlah Detail : 1

This is a computer generated message and requires no signature
Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Gambar 3. 101 Bukti Pembayaran Pajak

c. Format Rekapitulasi PPh 21

Gambar 3. 102 Format Rekap PPh 21

128

d. Melakukan rekapitulasi PPh 21

NO	BULAN	PEGAWAI TETAP			BKN PEGAWAI		
		JML PEGAWAI	BRUTO	PJK Terutang	JML PEGAWAI	BRUTO	PJK Terutang
1	JANUARI	34	123.519,155	1.741,670	1	298,969	7,474
	PB-1	34	123.519,155	1.741,670	1	298,969	7,474
2	FEBRUARI	32	125.503,504	1.945,378	1	500,000	12,500
TOTAL		100	372,541,814	5,428,718	3	1,097,938	27,448

REKAP PPH 21 MASA TAHUN 2024					
TENAGA AHLI			TOTAL		
JML PEGAWAI	BRUTO	PJK Terutang	PEGAWAI	BRUTO	PAJAK TERUTANG
			35	123,818,124	1,749,144
			35	123,818,124	1,749,144
			33	126,003,504	1,957,878
			-	-	-
-	-	-	103	373,639,752	5,456,166

KOMPENSASI	BAYAR	TGL BAYAR	TGL LAPOR	KETERANGAN
	1,749,144	2/12/2024	2/19/2024	
			3/7/2024	
	1,957,878	3/8/2024	3/18/2024	
-	3,707,022			

Gambar 3. 103 Rekapitulasi PPh 21

Berdasarkan Gambar 3.103, rekapitulasi PPh 21 diisi dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengisi kolom “nomor” dengan nomor 2, sesuai dengan urutan bulan Februari.
2. Mengisi kolom “bulan” dengan nama Februari.
3. Mengisi kolom “**pegawai tetap**” sesuai dengan Gambar 3.98 bagian **objek pajak (B)** dengan rincian “**jumlah pegawai**” sebanyak 32 [1], “**jumlah bruto**” sebesar Rp125.503.504 [2], dan “**jumlah pajak terutang**” senilai Rp1.945.378 [3].
4. Mengisi kolom “**bukan pegawai**” sesuai dengan Gambar 3.98 bagian **objek pajak (B)** dengan rincian “**jumlah pegawai**” sebanyak 1 [4], “**jumlah**

bruto” sebesar Rp500.000 [5], dan “**jumlah pajak terutang**” senilai Rp12.500 [6].

5. Selanjutnya, kolom “total” akan terisi secara otomatis berdasarkan rumus yang telah dibuat dari bulan Januari. Berdasarkan kolom “total”, jumlah pegawai di bulan Februari sebanyak 33 orang (32 orang + 1 orang), dengan jumlah bruto sebesar Rp126.003.504 (Rp125.503.504 + Rp500.000), serta jumlah pajak terutang senilai Rp1.957.878 (Rp1.945.378 + Rp12.500).
6. Pada kolom “bayar” akan terisi secara otomatis berdasarkan rumus yang telah dibuat dari bulan Januari dan nilainya sama dengan jumlah pajak terutang pada kolom “total” yaitu senilai Rp1.957.878 [7].
7. Mengisi kolom “tanggal bayar” sesuai dengan Gambar 3.99 yang memuat informasi tanggal pembayaran pajak, yaitu 3 Agustus 2024 [8].
8. Mengisi kolom “tanggal lapor” sesuai dengan Gambar 3.98 bagian **pernyataan dan tanda tangan (E)**, yaitu tanggal 18 Maret 2024.
- e. Melakukan cara yang sama untuk bulan lainnya.
- f. Setelah pekerjaan selesai, dokumen akan diberi kepada mentor untuk dijadikan bahan *cross check* dan *review*. Dokumen selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 15.

8. Bapak W

A. Menyusun SPT Tahunan OP (Orang Pribadi)

Menyusun SPT Tahunan OP (Orang Pribadi) merupakan proses pengisian dan pelaporan penghasilan serta harta yang dimiliki seseorang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tujuan dari menyusun SPT Tahunan OP adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan melaporkan jumlah pajak terutang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dokumen yang diperlukan untuk melakukan tugas ini adalah *file* Excel lampiran SPT Tahunan OP dan PDF SPT OP yang telah di-*download* dari *web* DJP. Kegiatan menyusun SPT Tahunan OP dilakukan untuk 1

tahun pajak dan wajib dilaporkan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahunnya.

Berikut tahapan dalam menyusun SPT Tahunan OP:

- a. Menerima *file* Excel lampiran SPT Tahunan OP

NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN
49	014	DEPOSITO	2024
50	032	SAHAM	2024
51	014	DEPOSITO	2024
52	021	PIUTANG	2024
53	032	SAHAM	2024
54	011	UANG TUNAI	2024
J U M L A H			

KETERANGAN	2024
	510.103
	2.887.500.000
	1.543.388.557
	933.333.334
UANG TUNAI	1.466.000.000
	19.018.249.797

Gambar 3. 104 Lampiran Daftar Harta

Berdasarkan Gambar 3.104, terdapat lampiran daftar harta yang dimiliki Bapak W sebanyak 54 item harta yang akan dilaporkan pada tahun 2024, dengan total nilai sebesar Rp19.018.249.797.

FORMULIR 1770 S - II KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		LAMPIRAN - II SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK 2 0 2 4
N P W P : 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : Bapak W				
BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL				
NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGHASILAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rp/ah)	PPh TERUTANG (Rp/ah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBL SURAT BERTAHAGA NEGARA	4.062.871	812.414	
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI			
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK			
4.	HADIAH UNDIAN			
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS			
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD			
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN			
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN			
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUNAN GUNA SERAH			
10.	BUNGA SIMPANNAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI			
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF			
12.	DIVIDEN (dari saham Tbk)			
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA			
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL			
J U M L A H B A G I A N A		J B A	812.414	

BAGIAN B : HARTA PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp/lot)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46.	014	DEPOSITO	2024	510.103	
47.	032	SAHAM	2024	2.887.500.000	
48.	014	DEPOSITO	2024	1.543.388.557	
49.	021	PIUTANG	2024	933.333.334	
50.	011	UANG TUNAI	2024	1.466.000.000	
JUMLAH BAGIAN B			JBB	19.018.249.797	

BAGIAN C : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN					
NO.	KODE UTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	104	PT Z	JAKARTA	2018	250.000.000
2	103	PT K	JAKARTA	2023	935.000.000
3	104	PT H	JAKARTA	2024	2.425.077.500
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
JUMLAH BAGIAN C			JBC		3.610.077.500

BAGIAN D : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA				
NO.	NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ibu S	-	ISTERI	-
2	K	-	ANAK	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-

FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTU

Halaman ke- 1 dari 2 halaman Lampiran-II

Gambar 3. 105 Lampiran II SPT Tahunan OP

Berdasarkan Gambar 3.105, diketahui terdapat rincian informasi lampiran II SPT Tahunan OP, sebagai berikut:

- I. Pada bagian **penghasilan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (A)**, terdapat jenis penghasilan bersifat bunga deposito, tabungan, diskonto SBI (Sertifikat Bank Indonesia), dan surat berharga negara dengan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp4.062.071, serta PPh terutang senilai Rp812.414 ($\text{Rp4.062.071} \times 20\%$) [1]. Jenis penghasilan tersebut mempunyai tarif PPh final sebesar 20% bagi wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan bagian A, jumlah bagian A untuk PPh terutang sebesar Rp812.414.
- II. Pada bagian **harta pada akhir tahun (B)**, terdapat rincian harta yang dimiliki Bapak W sebanyak 54 *item* untuk dilaporkan, dengan jumlah harta yang dilaporkan untuk tahun 2024 sebesar Rp19.018.249.797 [2].
- III. Pada bagian **kewajiban/utang pada akhir tahun (C)**, terdapat tiga nama pemberi pinjaman yang dilaporkan, diantaranya PT S, Bapak

T, dan PT M, dengan jumlah pinjaman masing-masing sebesar Rp250.000.000, Rp935.000.000, dan Rp2.425.077.500. Maka dari itu, diperoleh jumlah pada bagian C sebesar Rp3.610.077.500 (Rp250.000.000 + Rp935.000.000 + Rp2.425.077.500) [3].

IV. Pada bagian **daftar susunan anggota keluarga (D)**, Bapak W memiliki 2 tanggungan [4], diantaranya Ibu S sebagai Istri dan K sebagai anak.

FORMULIR		1770 S - I		LAMPIRAN - I		SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK				- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA - PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK - DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH				2 0 2 4	
NPWP		30 000 000 0 000 000							
NAMA WAJIB PAJAK		Bapak W							
BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)									
NO	JENIS PENGHASILAN					JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)			
(1)	(2)					(3)			
1.	BUNGA					-			
2.	ROYALTI					-			
3.	SEWA					-			
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH					-			
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA					-			
6.	PENGHASILAN LAINNYA					-			
JUMLAH BAGIAN A						JBA	-		
Produksi: Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka 10									
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK									
NO	JENIS PENGHASILAN					JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)			
(1)	(2)					(3)			
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH					-			
2.	WARISAN					-			
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI					45.450.000			
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA					-			
5.	BEASISWA					-			
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK					-			
JUMLAH BAGIAN B						JBB	45.450.000		
Produksi: Jumlah Bagian B ke Formulir Induk 1770 S Bagian B angka 10									
BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH									
NO	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK: PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/27P*	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT			
(1)	(2)	(3)	NOMOR	TANGGAL	(6)	(7)			
1.	PT S	1010000000	030000	2/21/2025	PPh PASAL 21	63.178.750			
2.	PT S	1034000000	032000	1/20/2025	PPh Pasal 21	65.503.950			
3.	-	-	-	-	-	-			
4.	-	-	-	-	-	-			
5.	-	-	-	-	-	-			
JUMLAH BAGIAN C						JBC	128.682.700		
Produksi: Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian C angka 10									

Gambar 3. 106 Lampiran I SPT Tahunan OP

Berdasarkan Gambar 3.106, diketahui terdapat rincian informasi lampiran I SPT Tahunan OP, sebagai berikut:

- I. Pada bagian **penghasilan neto dalam negeri lainnya (A)** Bapak W tidak memiliki penghasilan yang tercantum dalam bagian tersebut.
- II. Pada bagian **penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (B)**, Bapak W memiliki penghasilan dari “bagian laba anggota Perseroan komenditer tidak atas saham” sebesar Rp45.450.000 [5].
- III. Pada **bagian daftar pemotongan/pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung pemerintah (C)**, Bapak W memiliki dua bukti pemotongan PPh 21 dari PT S dengan nominal masing-masing sebesar Rp63.178.750 dan Rp65.503.950, sehingga total jumlah bagian C mencapai Rp128.682.700 (Rp63.178.750 + Rp65.503.950) [6].

FORMULIR		1770 S		SPT TAHUNAN		PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK								2024	
PERHATIAN		SEBELUM PENGISIAN HARUS DIISI DENGAN DATA YANG BENAR		IS DENGAN HURUF CETAK DAN TITIK DENGAN TITIK HATYAN				SPT PEMBELUNGAN KE...	
IDENTITAS		NPWP		30 000 000 0 000 000		NAMA WAJIB PAJAK		Bapak W	
		PEKERJAAN		KARYAWAN SWASTA		KLU		0900	
		NO. TELEPON		0800 00000000		NO. FAKS			
		STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI		X KK HB PH MT					
		NPWP ISTERI / SUAMI							
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.									
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)									
A. PENGHASILAN NETO		1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN		1		678.609.132		RUPIAH *)	
		2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA		2					
		3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI		3					
		4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)		4		678.609.132			
		5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB		5					
		6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (4-5)		6		678.609.132			
B. PENGHASILAN KENA PAJAK		7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK		TK / K / I		63.000.000			
		8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)				615.609.000			
C. PPh TERUTANG		9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)		9		128.682.700			
		10. PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG SELANJUTNYA		10					
		11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)		11		128.682.700			
D. KREDIT PAJAK		12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Disi dari Formulir 1770 S-Jumlah Bagian C Kolom (7))		12		128.682.700			
		13. a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)		13					
		b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT		14a					
		14. a. PPh PASAL 25		14b					
		b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)		14c					
		15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)		15					
E. PPh KURANG/LEBIH DIBAYAR		16. a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)		16					
		b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)		17					
		17. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon							
		a. DIRESTITUSIKAN		c. DIKEMBALKAN DENGAN SKPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu)					
		b. DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK		d. DIKEMBALKAN DENGAN SKPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)					

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN:	18	
	a. ☐ 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13 b. ☐ PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	
G. LAMPIRAN	a. ☒ Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Bukti Potong PPh Pasal 21	d. ☐ Perhitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak dengan status perpajakan PPh atau MIT
	b. ☐ Surat Setoran Pajak Lembar Ke-3 PPh Pasal 29	e. ☐
	c. ☐ Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)	
PERNYATAAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA TANGGAL 3 0 0 3 2 0 2 3 TGL BLN THN		TANDA TANGAN
NAMA LENGKAP : Bapak W		
N P W P : 30 000 000 0 000 000		

Gambar 3. 107 Lampiran Induk SPT Tahunan OP

Berdasarkan Gambar 3.107, diketahui terdapat rincian informasi lampiran induk SPT Tahunan OP, sebagai berikut:

- I. Pada bagian identitas, terdapat informasi yang dimiliki Bapak W dengan rincian berupa NPWP 3000000000000000, nama wajib pajak Bapak S, dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta, KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) 0900, nomor telepon 0800000000000, dan status kewajiban perpajakan suami isteri yaitu KK (Kepala Keluarga).
- II. Pada bagian **penghasilan netto (A)**, Bapak W memiliki penghasilan netto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan (1) senilai Rp678.609.132 [7], sehingga jumlah penghasilan netto (4) dan jumlah penghasilan netto setelah pengurangan zakat/sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (6) akan terhubung secara otomatis dari rumus yang telah dibuat.
- III. Pada bagian **penghasilan kena pajak (B)**, Bapak W dikenakan PKP (Penghasilan Kena Pajak) K/1, yang artinya Bapak W sudah kawin dan memiliki 1 tanggungan. Nilai dari PKP K/1 yaitu Rp63.000.000 (Rp58.500.000 + Rp4.500.000) [8], sehingga nilai penghasilan kena pajak (7) sebesar Rp615.609.000 (Rp678.609.132 - Rp63.000.000) [9].
- IV. Pada bagian **PPh terutang (C)**, nilai PPh terutang yang dikenakan Bapak W sesuai dengan tarif Pasal 17 UU PPh yaitu Rp128.682.700. Nilai tersebut merupakan nilai yang didapat dari tarif progresif yang

perhitungannya dilakukan dengan cara mengelompokkan PKP ke dalam lapisan penghasilan sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh, sebagai berikut:

- a) Lapisan pertama: Rp0-Rp60.000.000, dikenakan tarif 5%, sehingga $Rp60.000.000 \times 5\% = Rp3.000.000$.
 - b) Lapisan kedua: Rp60.000.000-Rp250.000.000, dikenakan tarif 15%, sehingga $Rp190.000.000 \times 15\% = Rp28.500.000$.
 - c) Lapisan ketiga: Rp250.000.000-Rp500.000.000, dikenakan tarif 25%, sehingga $Rp250.000.000 \times 25\% = Rp62.500.000$.
 - d) Lapisan keempat: Rp500.000.000-Rp5.000.000.000, dikenakan tarif 30%. Dikarenakan sudah terakumulasi sebesar Rp500.000.000 ($Rp60.000.000 + Rp190.000.000 + Rp250.000.000$), maka sisa PKP yang tersisa adalah Rp115.609.000 ($Rp615.609.000 - Rp500.000.000$), sehingga lapisan keempat menghasilkan nilai sebesar $Rp115.609.000 \times 30\% = Rp34.682.700$.
- V. Berdasarkan perhitungan empat lapisan sebelumnya, maka diperoleh PPh terutang untuk Bapak W di tahun 2024 sebesar Rp128.682.700 ($Rp3.000.000 + Rp28.500.000 + Rp62.500.000 + Rp34.682.700$) [10].
- VI. Pada bagian **kredit pajak (D)**, baris “PPh yang dipotong/dipungut pihak lain/ditanggung pemerintah dan/atau kredit pajak luar” (12) diisi sesuai dengan jumlah bagian C di lampiran 1, yaitu Rp128.682.700 [11].
- VII. Selanjutnya, di bagian pernyataan, terdapat informasi pribadi Bapak W yang harus diisi sebagai bentuk pernyataan atas pertanggungjawaban SPT yang akan dilaporkan. Informasi ilustrasi pernyataan tersebut berisi kolom yang bertanggung jawab atas SPT yaitu wajib pajak, tanggal pelaporan 30 Maret 2024, nama pelapor Bapak W, serta NPWP bernomor 3000000000000000.

- b. Mengisi SPT Tahunan OP di *file* yang telah di-download dari *website* DJP berdasarkan informasi lampiran Excel.

SELANJUTNYA >>

FORMULIR

1770 S - II

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN II

SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

* PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
* HARTA PADA AKHIR TAHUN
* KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
* DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK

2024

SPT PEMBEVALAN KE 0

NPWP: 3000000000000000

NAMA WAJIB PAJAK: Bapak W

BAGIAN A. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO SBI, SURAT BERTAHIL	4.062.071	812.414
2.	BUNGA/DISKONTO OBLIGASI	0	0
3.	PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK	0	0
4.	HADIAH UNDIAN	0	0
5.	PESANGON, TUNJANGAN HARI TUA DAN TEBUSAN PENSIUN YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	0	0
6.	HONORARIUM ATAS BEBAN APBD/APBN	0	0
7.	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
8.	SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	0	0
9.	BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA SERAH	0	0
10.	BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA KOPERASI	0	0
11.	PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF		
12.	DIVIDEN	0	0
13.	PENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA	0	0
14.	PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL	0	0
JUMLAH BAGIAN A		(JBA)	812.414

BAGIAN B. HARTA PADA AKHIR TAHUN

Impor Data

KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN	KETERANGAN
014 - Deposito	DEPOSITO	2024	1.543.388.567	
021 - Piutang	PIUTANG	2024	933.333.334	
032 - Saham	SAHAM	2024	0	
011 - Uang Tunai	UANG TUNAI	2024	1.466.000.000	UANG TUNAI
JUMLAH BAGIAN B			(JBB)	19.018.249.798

Tambah Hapus Data ke- 54 Prev Rows 51 To 54 Of 54

BAGIAN C. KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

Impor Data

KODE HUTANG	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH PINJAMAN
109 - Utang Lainnya	PT Z	JAKARTA	2018	250.000.000
109 - Utang Lainnya	PT K	JAKARTA	2023	935.000.000
109 - Utang Lainnya	PT H	JAKARTA2024	2024	2.425.077.500
JUMLAH BAGIAN C				(JBC)

Tambah Hapus Data ke- 3 Prev Rows 1 To 3 Of 3

BAGIAN D. DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NAMA	NIK	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
Ibu S	0000000000000000	ISTRI	-
K	0000000000000000	ANAK	-

Tambah Hapus Data ke- 2 Prev Rows 1 To 2 Of 2

Gambar 3. 108 Lampiran II SPT Tahunan OP

Berdasarkan Gambar 3.108, informasi tabel lampiran II SPT Tahunan OP diisi berdasarkan Gambar 3.105, sebagai berikut:

- I. Pada bagian **(A) Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Dan/Atau Bersifat Final**, kolom bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara (1) diisi senilai Rp4.062.071 dan PPh terutang sebesar Rp812.414 ($\text{Rp4.062.071} \times 20\%$) [1]. Selanjutnya, jumlah bagian A akan secara otomatis terisi senilai Rp812.414 dari Bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara (1).
- II. Pada bagian **(B) Harta Pada Akhir Tahun**, perlu dilakukan impor data atas seluruh harta yang dimiliki oleh Bapak W. Impor data ini dilakukan menggunakan *template file* excel yang di-download dari *website* DJP.

A	B	C	D	E
Kode Harta	Nama Harta	Tahun Perolehan	Harga Perolehan	Keterangan
11	UANG TUNAI	2017	90000000	MILIK PRIBADI

Gambar 3. 109 Template File Daftar Harta

Berdasarkan Gambar 3.109, *template file* daftar harta yang telah di-download dari *website* DJP memiliki kolom dengan judul kode harta, nama harta, tahun perolehan, dan keterangan.

- III. Pindahkan data “daftar harta” pada Gambar 3.102 ke *template file* daftar harta, sehingga tampilannya akan berbentuk sebagai berikut:

Kode Harta	Nama Harta	Tahun	Perc Harga Perolehan	Keterangan
014	DEPOSITO	2024	19894019	
014	DEPOSITO	2024	510103	
032	SAHAM	2024	2887500000	
014	DEPOSITO	2024	1543388557	
021	PIUTANG	2024	933333334	
032	SAHAM	2024	0	
011	UANG TUNAI	2024	1466000000	UANG TUNAI

Gambar 3. 110 File Daftar Harta

- IV. Klik “Impor Data” di bagian **(B) Harta Pada Akhir Tahun** menggunakan *file* daftar harta. Pastikan seluruh data sudah sesuai dan jumlah harga perolehan adalah sebesar Rp19.018.249.798 [2].
- V. ada bagian **(C) Kewajiban Pada Akhir Tahun**, isi sesuai dengan informasi Gambar 3.103 yang mempunyai jumlah total pinjaman sebesar Rp3.610.077.500 dari tiga pemberi pinjaman [3].
- VI. Pada bagian **(D) Daftar Susunan Anggota Keluarga**, isi sesuai dengan informasi Gambar 3.105 yang menunjukkan wajib pajak menanggung 2 anggota keluarga yaitu istri dan anak [4].

FORMULIR **1770 S - I**
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I
SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK **2024**
SPT PEMBELUTAN KE **0**

NPWP **3000000000000000**
NAMA WAJIB PAJAK **Bapak W**

BAGIAN A. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

No.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BUNGA	0
2.	ROYALTI	0
3.	SEWA	0
4.	PENGHARGAAN DAN HADIAH	0
5.	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA	0
6.	PENGHASILAN LAINNYA	0
JUMLAH BAGIAN A (JBA)		0

BAGIAN B. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

No.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1.	BANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH	0
2.	WARISAN	0
3.	BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEORAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI	45.450.000
4.	KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA	0
5.	BEASISWA	0
6.	PENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	0
a.	PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YANG DIPEROLEH WNA DENGAN KEAHLIAN TERTENTU (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1a) UU PPh)	0
b.	PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PPh	0
c.	PENGHASILAN LAINNYA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK	0
JUMLAH BAGIAN B (JBB)		45.450.000

BAGIAN C. DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

Impor Data

NO.	NAMA PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN NOMOR	TANGGAL	JENIS PAJAK PPh PASAL	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG/ DIPUNGUT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PT S	1010000000	020000	21/02/2025	Pasal 21	63.178.750
2	PT S	1034000000	032000	20/01/2025	Pasal 21	65.503.950
JUMLAH BAGIAN C						128.682.700

Tambah Hapus Data ke- 2

Gambar 3. 111 File Daftar Harta

Berdasarkan Gambar 3.111, informasi tabel lampiran II SPT Tahunan OP diisi berdasarkan Gambar 3.106, sebagai berikut:

- I. Pada bagian **(A) Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya**, tidak perlu diisi karena wajib pajak tidak memiliki penghasilan dari kategori tersebut.
- II. Pada bagian **(B) Penghasilan yang Tidak Termasuk Objek Pajak**, hanya kolom “bagian laba anggota perseroan komanditer tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi” yang diisi, sehingga jumlah bagian **(B)** adalah sebesar Rp45.450.000 [5].
- III. Pada bagian **(C) Daftar Pemotongan/Pemungutan PPh Oleh Pihak Lain dan PPh yang Ditanggung Pemerintah**, terdapat jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp128.682.700 (Rp63.178.750 + Rp65.503.950) [6] dari satu pemotong pajak.

FORMULIR 1770 S		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI		TAHUN PAJAK	
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : * DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA * DALAM NEGERI LAINNYA, DAN/ATAU * YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL		2024 SPT PEMBELUTAN KE 0	
<< KEMBALI SELESAI >>					
IDENTITAS NPWP : 3000000000000000 NAMA WAJIB PAJAK : Bapak W PEKERJAAN : AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL KLU : 0900 NO. TELEPON : 08000000000000 NO. FAKS : STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI/ISTERI : ☒ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT NPWP ISTERI/SUAMI : Pemohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. *) PENGHASILAN KOLON-KOLON YANG BERSI NILAI RUPIAH HARUS TANPA NILAI DESIMAL (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3) 7 RUPIAH *)					
A. PENGHASILAN NETO		1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (dari seluruh penghasilan neto wajib pajak terdapat 1770-S4 dan/atau 1770-S4 yang disampaikan atau bukti Polong Lari)		1.	678.609.132
		2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [[Disis sesuai dengan Formulir 1770-S4 Jumlah Bagian A]]		2.	0
		3. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI (Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian)		3.	0
		4. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)		4.	678.609.132
		5. ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB		5.	0
		6. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN VAJIB KEAGAMAAN (15-5)		6.	678.609.132
B. PENGHASILAN KENA PAJAK		7. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK ☐ TK/ ☒ K/ ☐ K/L/		7.	63.000.000
		8. PENGHASILAN KENA PAJAK (6-7)		8.	615.609.000
C. PPh TERUTANG		9. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8) (Bagi Wajib Pajak dengan status PH atau MT diisi dari Lampiran Pemotongan PPh-Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G-Lampiran huruf d) ☐ Menggunakan perhitungan sendiri		9.	128.682.700
		10. PENGEMBALAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN		10.	0
		11. JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)		11.	128.682.700
D. KREDIT PAJAK		12. PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI (Isi dari Formulir 1770-S4 Jumlah Bagian C Kolom 11)		12.	128.682.700
		13. a. ☐ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)		13.	0
		b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT			
		14. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25		14a.	0
		b. STP PPh Pasal 25 (Harga Pokok Pajak)		14b.	0
		15. JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b)		15.	0

PERNYATAAN		TANDA TANGAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah beritahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
☒ WAJIB PAJAK ☐ KUASA	TANGGAL	
NAMA LENGKAP :	12 27/03/2025	
NPWP :	3000000000000000	

Gambar 3. 112 Lampiran Induk SPT Tahunan OP

Berdasarkan Gambar 3.112, informasi tabel lampiran II SPT Tahunan OP diisi berdasarkan Gambar 3.107, sebagai berikut:

- I. Pada bagian **(A) Penghasilan Neto**, kolom “Penghasilan Neto Dalam Negeri Sehubungan Dengan Pekerjaan” diisi sebesar Rp678.609.132 [7], sehingga “Jumlah Penghasilan Neto” dan “Jumlah Penghasilan Neto Setelah Pengurangan Zakat/Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib” secara otomatis tetap sebesar Rp678.609.132.
- II. Pada bagian **(B) Penghasilan Kena Pajak**, kolom “Penghasilan Tidak Kena Pajak” akan secara otomatis menampilkan nilai sebesar Rp63.000.000 [8] apabila memilih K/1. Dalam kasus Bapak W, karena istri mempunyai NPWP sendiri, maka pada saat saat pelaporan SPT, Bapak W menggunakan PTKP K/1, yang berarti sudah kawin dan memiliki tanggungan 1 (anak). Selanjutnya, kolom “Penghasilan Kena Pajak” akan secara otomatis terisi sebesar Rp615.609.000 (Rp678.609.132 - Rp63.000.000) [9].
- III. Pada bagian **(C) PPh Terutang**, kolom “PPh Terutang” dan “Jumlah PPh Terutang” akan secara otomatis terisi senilai Rp128.682.700, sesuai dengan penjelasan pada Gambar 3.105 [10].
- IV. Pada bagian **(D) Kredit Pajak**, kolom “PPh yang Dipotong/Dipungut Pihak Lain/Ditanggung Pemerintah Dan/Atau Kredit Pajak Luar” akan secara otomatis terisi sebesar Rp128.682.700 [11].
- V. Setelah semua bagian terisi, lakukan *cross check* dengan mentor sebelum klik “Selesai”.

VI. Selanjutnya, pada bagian tanggal di pernyataan, isi dengan tanggal 27 Maret 2025 [12] atau pada hari SPT akan dilaporkan. Setelah itu, klik “Selesai” untuk mendapatkan kode verifikasi.

The screenshot shows a web interface with a light blue background. At the top, there is a button labeled "<< KEMBALI". Below it, a red box highlights a file upload section. It includes a circular icon with the number 13, a text input field labeled "Unggah Lampiran" containing the filename "Bulpet AI Bopak W_2024.pdf", and a small 'X' icon. To the right of this box, a note states: "Digunakan untuk mengupload semua jenis lampiran PDF yang diperlukan. (File berupa .pdf, max 40MB)". Below the upload section, a text prompt says "Silahkan masukkan Kode Verifikasi yang bisa dilihat di email Anda." This is followed by a "Kode Verifikasi" label and a red box containing a text input field with the value "ABC123V" and a "SUBMIT" button. A circular icon with the number 14 is next to the submit button. Below the submit button is a "REFRESH QR CODE" button. At the bottom of the form, there is a large black rectangular redaction box.

Gambar 3. 113 Lampiran Induk SPT Tahunan OP

Berdasarkan Gambar 3.113, pada lampiran verifikasi, bagian “unggah lampiran” [13] di-*upload* menggunakan *file* bukti potong A1 dan memasukkan kode verifikasi yang telah dikirim lewat email. Setelah itu, klik “*Submit*” [14].

- c. Setelah pekerjaan selesai dilakukan, dokumen yang telah di-*submit* akan dicetak satu persatu dan dikumpulkan menjadi 1 dokumen sebagai lampiran cadangan yang akan dikasih untuk mentor. Dokumen selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 16.

3.3 Kendala yang Ditemukan

Selama pelaksanaan magang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. *Software* Accurate yang sering sulit dibuka dan mengalami *error*, sehingga menghambat kelancaran pekerjaan.

2. Sering ditemukan nomor *invoice* yang sama (*double invoice*) selama proses entri pada *software* Accurate.

3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan

Solusi atas kendala yang dihadapi selama magang yaitu:

1. Solusi dari kendala pertama yaitu menunggu hingga *software* Accurate dapat merespon perintah yang dipilih sebelumnya dan menghindari data yang tidak tersimpan.
2. Solusi dari kendala kedua yaitu berkonsultasi dengan mentor, sehingga nomor *invoice* yang terduplikasi dapat dimodifikasi sesuai arahan untuk menghindari kesalahan data.